



REPUBLIK INDONESIA



Kementerian PPN/
Bappenas

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rancangan Awal RKP 2018

**Deputi Bidang Pengembangan Regional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Disampaikan dalam Pembukaan Rangkaian Musrenbang Provinsi Jawa Barat

Cirebon, Februari 2017



1

Pengantar

1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan ***Money Follow Program***.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan **Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial** dengan memperhatikan pada:
 - Pengendalian perencanaan
 - Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018
 - Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
 - Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

**RKP
2018**



Menajamkan Prioritas Nasional



10 PN dan 30 Program Prioritas



Memastikan pelaksanaan program



Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)



Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan



Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta

Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Melanjutkan implementasi *Money Follow Program*

1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (*Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU - PINA*)
2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”)
3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran

Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah

1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan
2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional
3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional
4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja operasional – belanja prioritas)

Memperkuat kendali program

1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu
2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program
3. Melaksanakan data *sharing* (*Bappenas-KemKeu-Menko*) untuk pengendalian dan monev
4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan

Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk memastikan rencana dijalankan dengan baik

PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba

| KEMENTERIAN/LEMBAGA | Target | (Rp M) | Lokasi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------|
| KEMENTERIAN PU & PERA | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu | 25 Km | 150 | Kab. Samosir |
| <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Jalan Tol Baru Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi | 18 Km | 59,5 | Provinsi Sumatera Utara |
| <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir | 1 Paket | 6,5 | Kab. Samosir |
| <ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi Kawasan Danau Toba | 1 Paket | 9,8 | Tersebar |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala Namu-Pematang Siantar | 8 Km | 1.130,0 | Provinsi Sumatera Utara |
| BUMN | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Bandar Udara Silangit (AP 1) | 1 paket | 100,0 | Kab. Tapanuli Utara |
| KEMENTERIAN PARIWISATA | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Proyek Promosi produk destinasi wisata Danau Toba melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah | 8 paket | 10,7 | Luar Negeri |
| <ul style="list-style-type: none"> Proyek Peningkatan sarana dan prasarana Akademi Pariwisata Medan | 1 unit | 25,0 | Kota Medan |

PRIORITAS NASIONAL

Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS

Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Sarpras Transportasi
2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan
3. Penyiapan Daya Tarik Wisata

SASARAN, LOKASI DAN PAGU

PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis kewilayahan

Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (APBN/PHLN)

Jalan Palipi - Parmonangan (DAK)

Jalan SP.Provinsi-Desa Hutarihit (DAK)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu (APBN/SBSN)

Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu (APBN/SBSN)



CONTOH : Kawasan Pariwisata Danau Toba

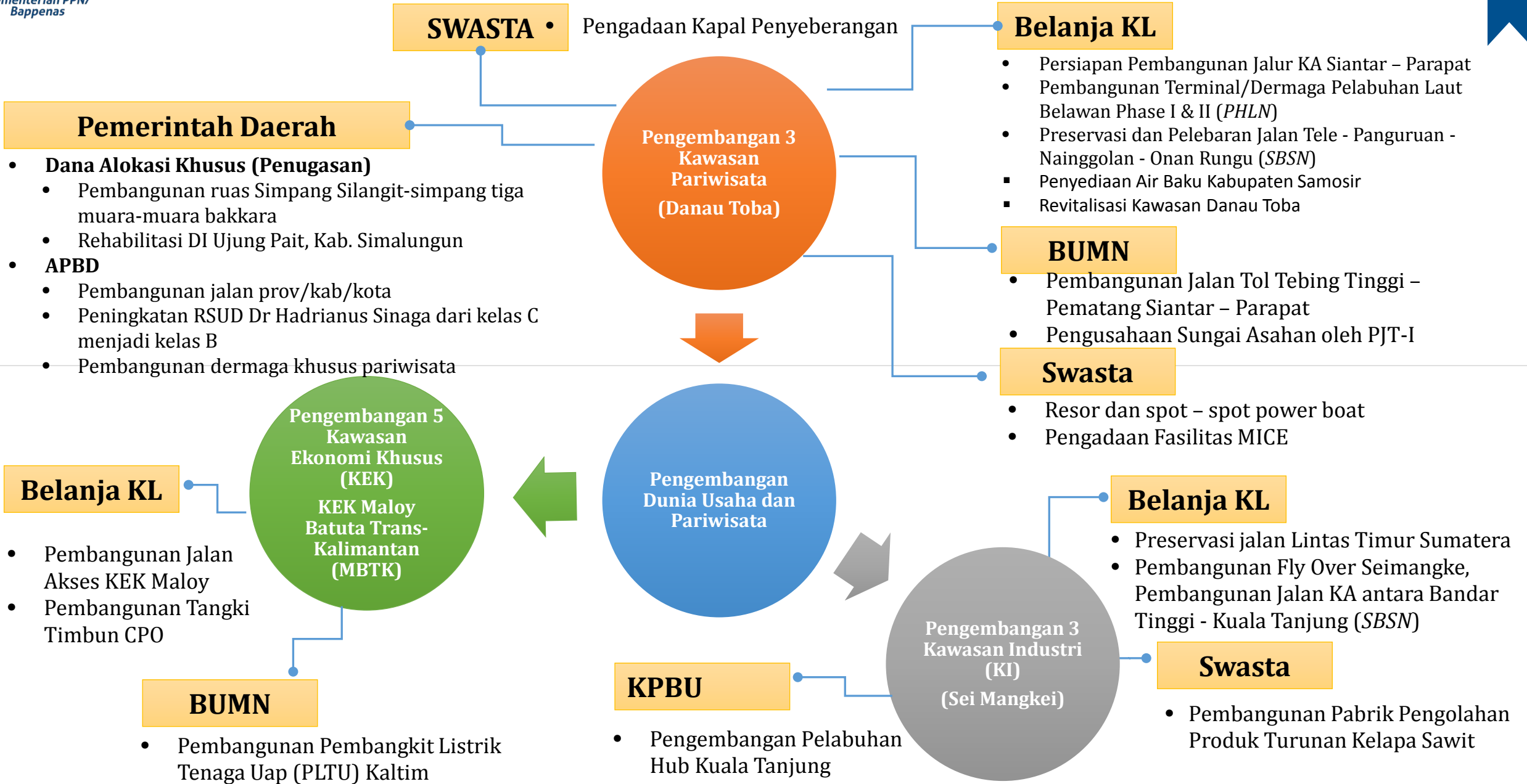
Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir (APBN)

Revitalisasi Kawasan Danau Toba (APBN)

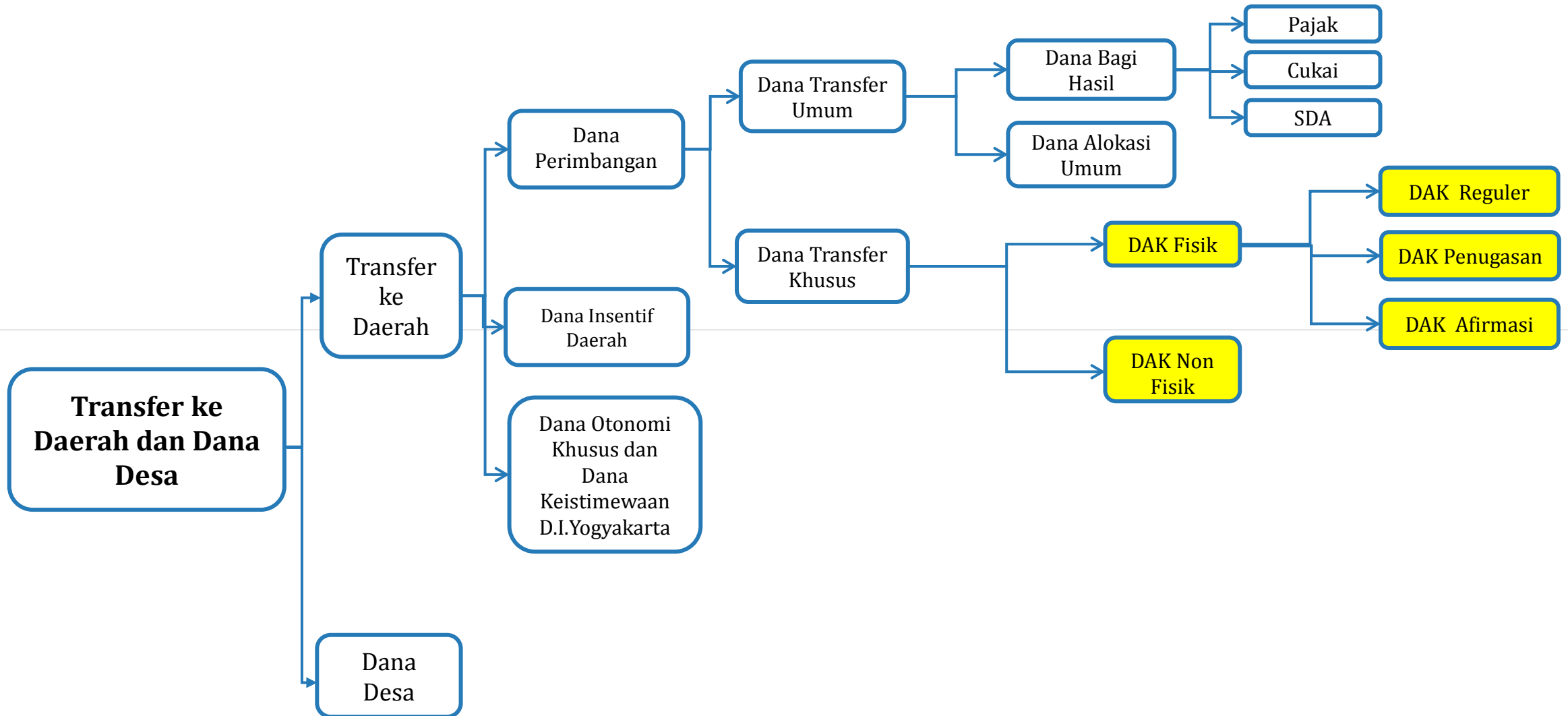
Pembangunan Jalan Tol Medan -Kualanamu - Tebing Tinggi (APBN/PHLN)

Pengembangan Bandara Silangit (BUMN)

Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan



Struktur Transfer ke Daerah dan Dana Desa



| NO | DAK PENUGASAN | KEGIATAN |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peningkatan kualitas SMK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan/rehabilitasi ruang praktik siswa (RPS)/ruang pembelajaran/laboratorium/ruang penunjang pembelajaran ▪ peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi/peralatan laboratorium/media pembelajaran |
| 2. | Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan latihan ketenagakerjaan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan alat pendidikan vokasi dan balai latihan ketenagakerjaan ▪ Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan vokasi dan balai latihan ketenagakerjaan |
| 3. | Peningkatan kapasitas infrastruktur kesehatan dasar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan farmasi dan alat kesehatan ▪ Pembangunan dan rehabilitasi berat Puskesmas |
| 4. | Pasar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pasar ▪ Pembangunan gudang |
| 5. | Penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan sarana dan prasarana air minum ▪ Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi |
| 6. | Irigasi | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi ▪ Rehabilitasi jaringan irigasi |
| 7. | Jalan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi ▪ Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten/Kota |
| 8. | Energi Skala Kecil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Skala Kecil : Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) |

1. DAK Penugasan terkait dengan penekanan RKP 2018
 - Ditentukan hingga locus/ruas
 - Lebih bersifat *top-down*
2. Kegiatan DAK lainnya menjadi bagian kegiatan dari DAK Reguler/Afirmasi
 - Menjaga kesinambungan dengan DAK 2017
 - Lebih bersifat kebutuhan daerah (bottom up)

Catatan:

Masih akan dilakukan penyempurnaan dan penajaman terhadap Bidang dan Menu DAK Penugasan

2

Kerangka Makro dan Wilayah

Asumsi Ekonomi Makro 2018



| INDIKATOR EKONOMI | Skenario 2018 |
|-----------------------------------|--------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 6,1 (5,5 – 6,1) |
| Inflasi (%): average | 3,5 ± 1 |
| Nilai Tukar (USD/IDR): average | 13.600 |
| ICP (USD/Barrel) | 55 |
| Lifting Minyak (ribu barrel/hari) | 730 |
| Lifting Gas (BOE/hari) | 1.150 |

Resiko

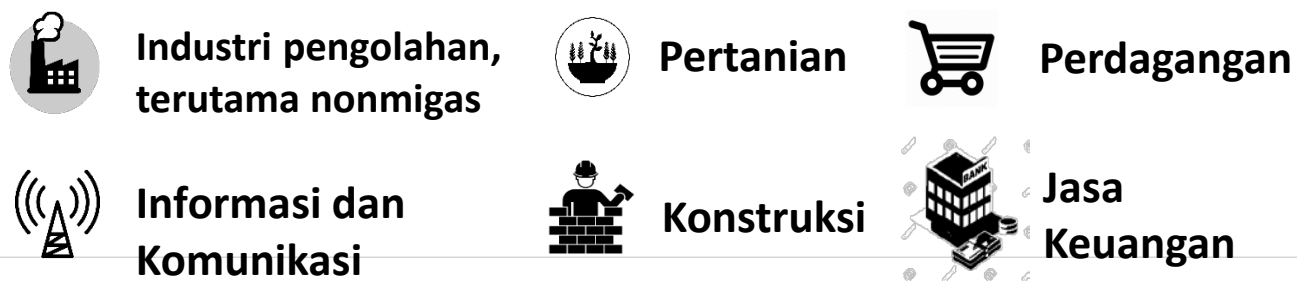
- Asumsi ekonomi makro 2018 disusun dengan asumsi terjadi perbaikan pada pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia.
- Harga minyak dunia yang lebih tinggi dapat berdampak positif terhadap penerimaan. Namun dapat berdampak juga pada kenaikan inflasi

Arahan Bapak Presiden pada Sidkab Paripurna November 2016

Untuk APBN 2018, Presiden menginstruksikan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1%. Selama 3 tahun pemerintahan, pertumbuhan ekonomi sempat berada di bawah 5%, yaitu 4,8% pada 2014 dan 5% pada 2015. Indonesia belum pernah tumbuh mendekati 6%. Presiden mengharapkan agar hal ini dapat diupayakan bersama.

Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Produksi

6 Sektor utama yang memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan adalah:



3 Sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan adalah:



| Komponen Sisi Produksi | Pertumbuhan (%) | Share (%) | Sumber Pertumbuhan (%) |
|----------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
| PDB | 6,1 | 100 | 6,1 |
| - Industri Pengolahan | 5,7 | 20,2 | 1,2 |
| - Konstruksi | 8,5 | 11,8 | 0,9 |
| - Perdagangan | 6,3 | 13,1 | 0,8 |
| - Informasi dan Komunikasi | 11,9 | 3,7 | 0,6 |
| - Jasa Keuangan | 11,5 | 4,5 | 0,5 |
| - Pertanian | 4,0 | 12,8 | 0,5 |
| - Transportasi | 8,2 | 5,5 | 0,3 |
| - Listrik dan Gas | 6,1 | 1,2 | 0,06 |

Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Pengeluaran

| Komponen Sisi Pengeluaran | Pertumbuhan Tahun 2018 (%) | |
|---------------------------|----------------------------|----------|
| | Baseline | Skenario |
| PDB | 5,2 | 6,1 |
| - Konsumsi RT | 5,2 | 5,4 |
| - Konsumsi LNPRT | 8,5 | 9,6 |
| - Konsumsi Pemerintah | 4,6 | 5,3 |
| - Investasi (PMTB) | 5,5 | 8,0 |
| - Ekspor | 1,7 | 2,2 |
| - Impor | 1,7 | 2,6 |

Target Pertumbuhan Ekonomi 6,1 Persen Persen

Konsumsi dan investasi harus menjadi pendorong pertumbuhan

Kebutuhan Investasi: Rp 5.356,5 T



Konsumsi pemerintah akan relatif terbatas seiring ruang fiskal yang sempit, dan prioritas pada alokasi belanja modal



- Kinerja ekspor masih terbatas seiring dengan lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas. Namun ekspor jasa akan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan pariwisata
- Impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan permintaan domestik





Untuk mencapai 6,1 persen..... **Perlu Kerja Keras dan Langkah Konkrit**

UPAYA PEMERINTAH



Investasi Pemerintah secara selektif

- ✓ Ruang untuk peningkatan terbatas, tetapi tetap dijaga **dengan merealokasi belanja non produktif ke belanja investasi**
- ✓ Fokus pada proyek yang **mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta**:
 - a. Infrastruktur listrik
 - b. Infrastruktur transportasi dan logistik
 - Pelabuhan (penurunan *dwelling time*)
 - Pergudangan
 - Jalan → untuk mendukung konektivitas



Fasilitasi Kebijakan untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi

- ✓ **Peningkatan Investasi Swasta**
 - **Perlu fokus untuk menghapuskan hambatan berkembangnya swasta di 6 sektor utama** (industri pengolahan nonmigas, pertanian, perdagangan, konstruksi, informasi telekomunikasi, dan jasa keuangan)
 - Deregulasi peraturan investasi (peningkatan kemudahan berusaha, EoDB menuju peringkat 40)
 - **Pembenahan Iklim investasi di daerah**
 - **Fasilitasi masalah investasi** (RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, penyelesaian pengaduan masalah investasi)
 - Pemanfaatan dan penyaluran **dana repatriasi untuk investasi**
 - Perbaiki **iklim ketenagakerjaan**: penyempurnaan UU ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN)
- ✓ **Menjaga Daya Beli Masyarakat**
- ✓ **Reformasi Struktural**

Target Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2018

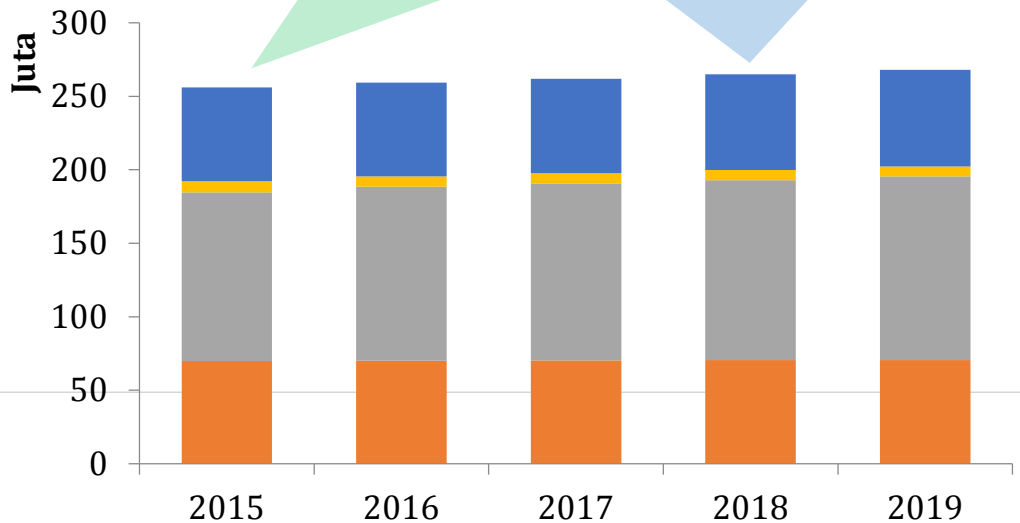
TAHUN 2016

Jumlah penduduk miskin sekitar 27,8 juta jiwa
(Sumber: BPS, Sept 2016)

Jumlah penduduk berdasarkan SUPAS 2015 = 255,18 juta jiwa

Jumlah penduduk berdasarkan proyeksi = 265,02 juta jiwa

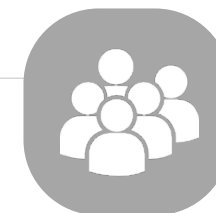
TAHUN 2018



■ Bukan Angkatan Kerja
■ Pekerja
■ Penganggur
■ Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14)



Penduduk Bukan Usia Produktif (0-14): 70,5 juta



Penduduk Usia Produktif (15+): 194,5 juta



Angkatan Kerja: 129,4 juta



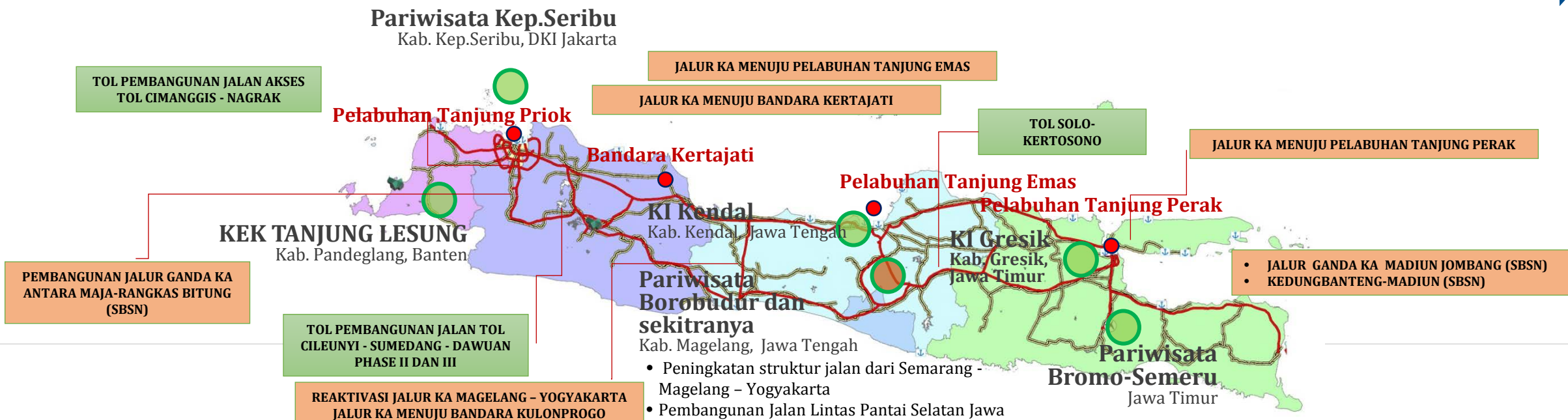
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperkirakan 67%

TARGET PEMBANGUNAN 2018

- Target tingkat kemiskinan: 9-10%
- Target tingkat pengangguran terbuka: 5,3-5,5%
- Target rasio gini: 0,38

Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun

Rencana Pengembangan Wilayah Jawa Tahun 2018



| Wilayah Jawa 2018 | |
|--------------------------------------|------|
| Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi | 6,23 |
| Sasaran Tingkat Kemiskinan | 9,45 |
| Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka | 5,90 |



Lokasi prioritas penurunan tingkat pengangguran terbuka :

1. Provinsi Jawa Barat
2. Provinsi Banten

Sektor-sektor penggerak perekonomian

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran
3. Konstruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

- Modernisasi Jaringan Irigasi Di. Rentang
- Normalisasi dan Perkuatan Tanggul Kali Bekasi, Kali Cikeas, Kali Cileungsi, Kali Cisdane
- Pembangunan Bendung Di. Kamijoro Kab. Bantul
- Pembangunan Bendungan: Bener, Ciawi, Cipanas, Leuwikeris, Sukamahi, Sindang Heula, Way Sekampung, Bendo, Gondang, Pidekso, Tukul
- Pembangunan Di. Progo Pistan Kab. Temanggung
- Pembangunan Pengaman Pantai di Jakarta Tahap 2

 Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
 Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

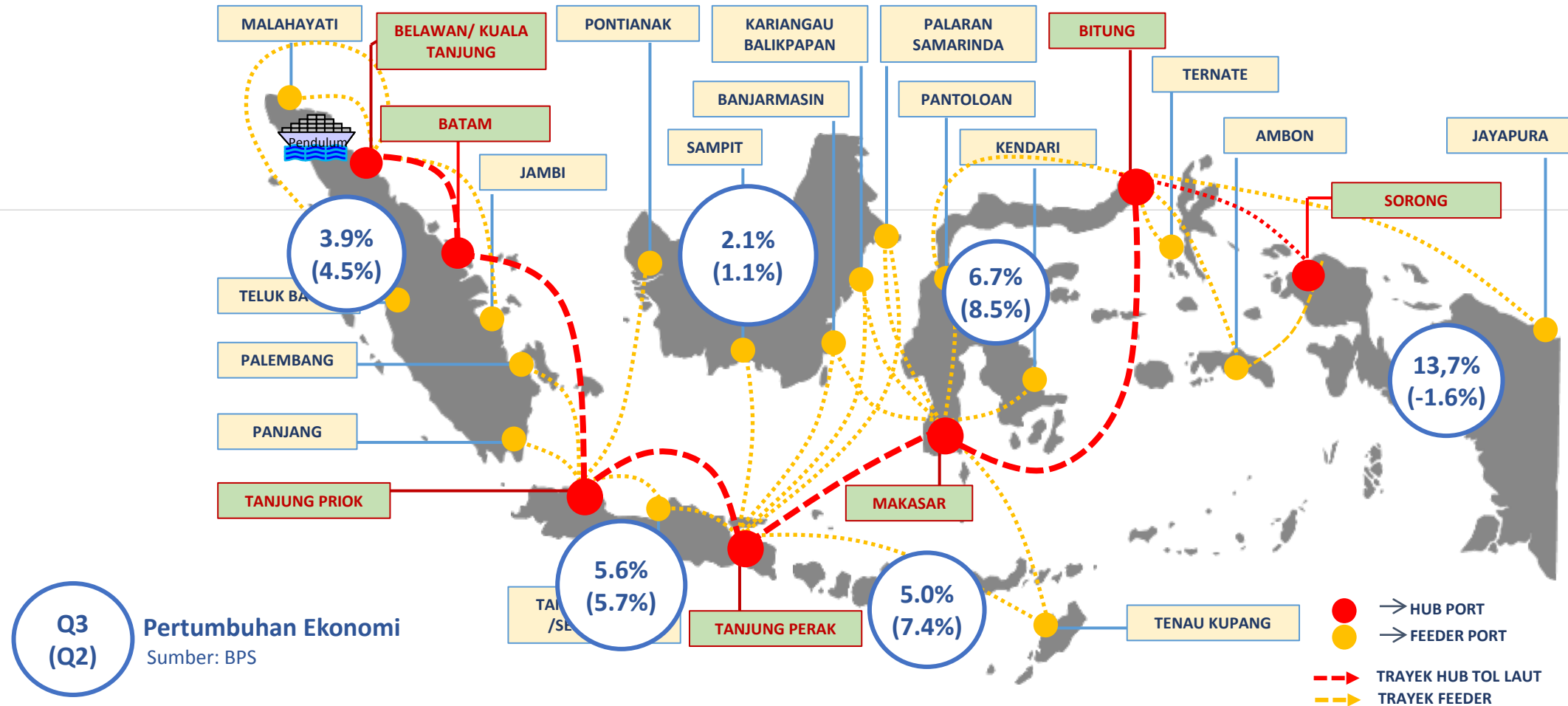
• PLTA: Jatigede, Upper Cisokan, Rajamandala

Lokasi prioritas penurunan tingkat kemiskinan :

1. Provinsi D.I Yogyakarta
2. Provinsi Jawa Tengah
3. Provinsi Jawa Timur
4. Provinsi Jawa Barat

Perbaikan Pertumbuhan Ekonomi Spasial

“ Untuk mengurangi ketimpangan dan penurunan biaya logistik, diperlukan pengembangan kawasan-kawasan industri pengolahan dan meningkatkan produktivitas daerah-daerah potensial terutama di Kawasan Timur (Sulawesi yang memiliki pertumbuhan >> rata-rata nasional) yang terintegrasi dengan tol laut sebagai tulang punggung distribusi logistik”



3

Rancangan Tema, Prioritas Nasional, dan Program Prioritas

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :
“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”

Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018

- Memperbaiki **Kualitas Belanja**.
- Peningkatan **iklim usaha dan iklim investasi** yang lebih kondusif
- Peningkatan **daya saing** dan **nilai tambah** industri
- Peningkatan **peran swasta** dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur



Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional

Peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial

| RKP 2015*) | RKP 2016 | RKP 2017 | RKP 2018 | RKP 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan | Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas | Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah | MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS | <i>Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019</i> |

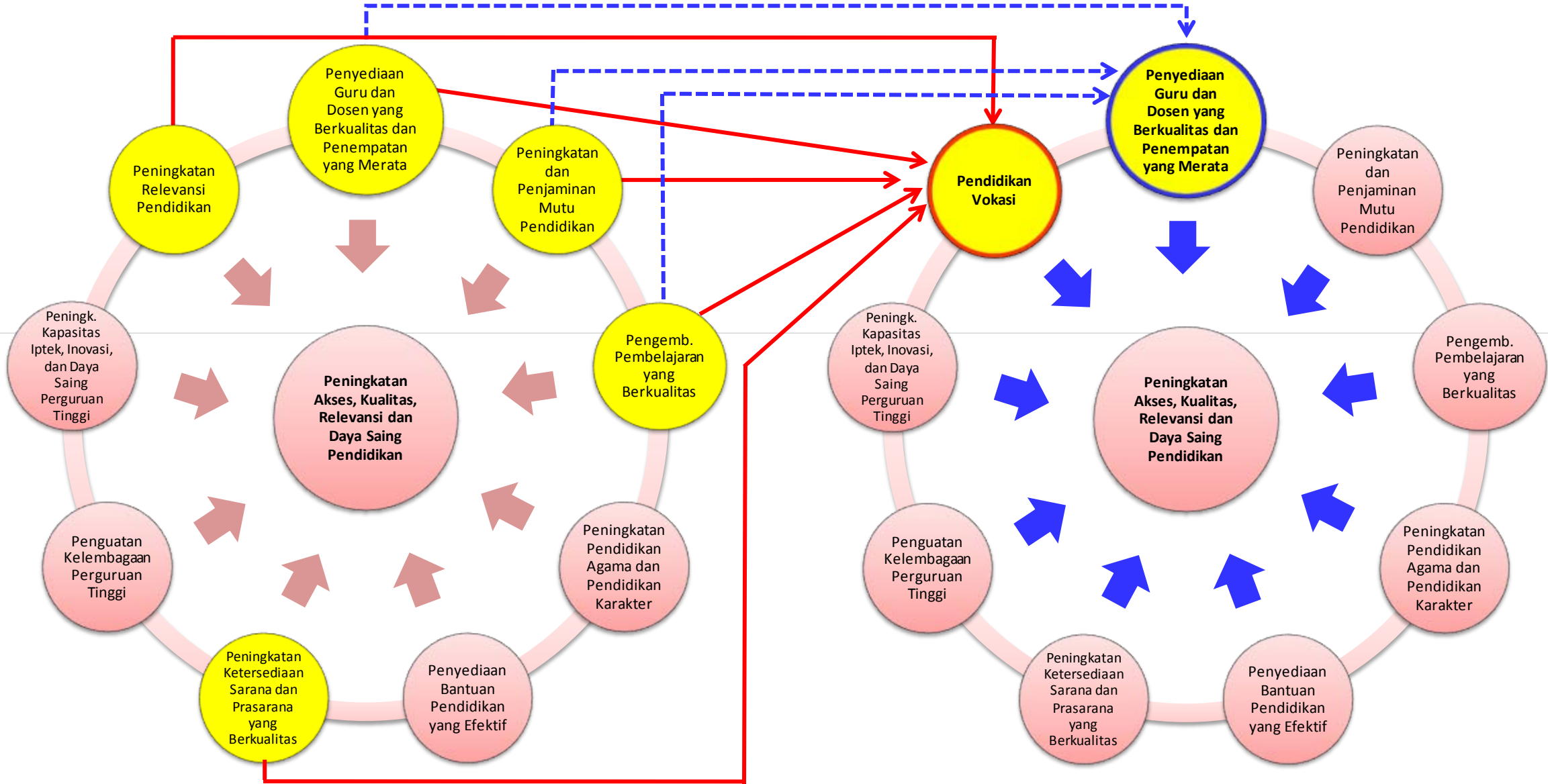
| URAIAN | RKP 2017 | RANCANGAN RKP 2018 |
|--------------------|-----------------|---------------------------|
| Prioritas Nasional | 23 | 10 |
| Program Prioritas | 88 | 30 |

- Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan
- Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran

Contoh Penajaman Program Prioritas: Prioritas Nasional Pendidikan

RKP 2017

Rancangan RKP 2018



Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018

Revolusi Mental

I. PENDIDIKAN

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan kualitas guru

II. KESEHATAN

3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

6. Penyediaan Perumahan Layak
7. Air Bersih dan Sanitasi

IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi

V. KETAHANAN ENERGI

13. EBT dan Konservasi Energi
14. Pemenuhan Kebutuhan Energi

VI. KETAHANAN PANGAN

15. Peningkatan Produksi pangan
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

IX. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
23. Pembangunan Perdesaan
24. Reforma Agraria
25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. Kebakaran Hutan)
26. Percepatan Pembangunan Papua

X. POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN

27. Penguatan Pertahanan
28. Stabilitas Politik dan Keamanan
29. Kepastian Hukum
30. Reformasi Birokrasi

Perubahan Iklim

Kesetaraan Gender

Tata kelola Pemerintahan yang Baik

Highlight Proyek Prioritas Terintegrasi: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

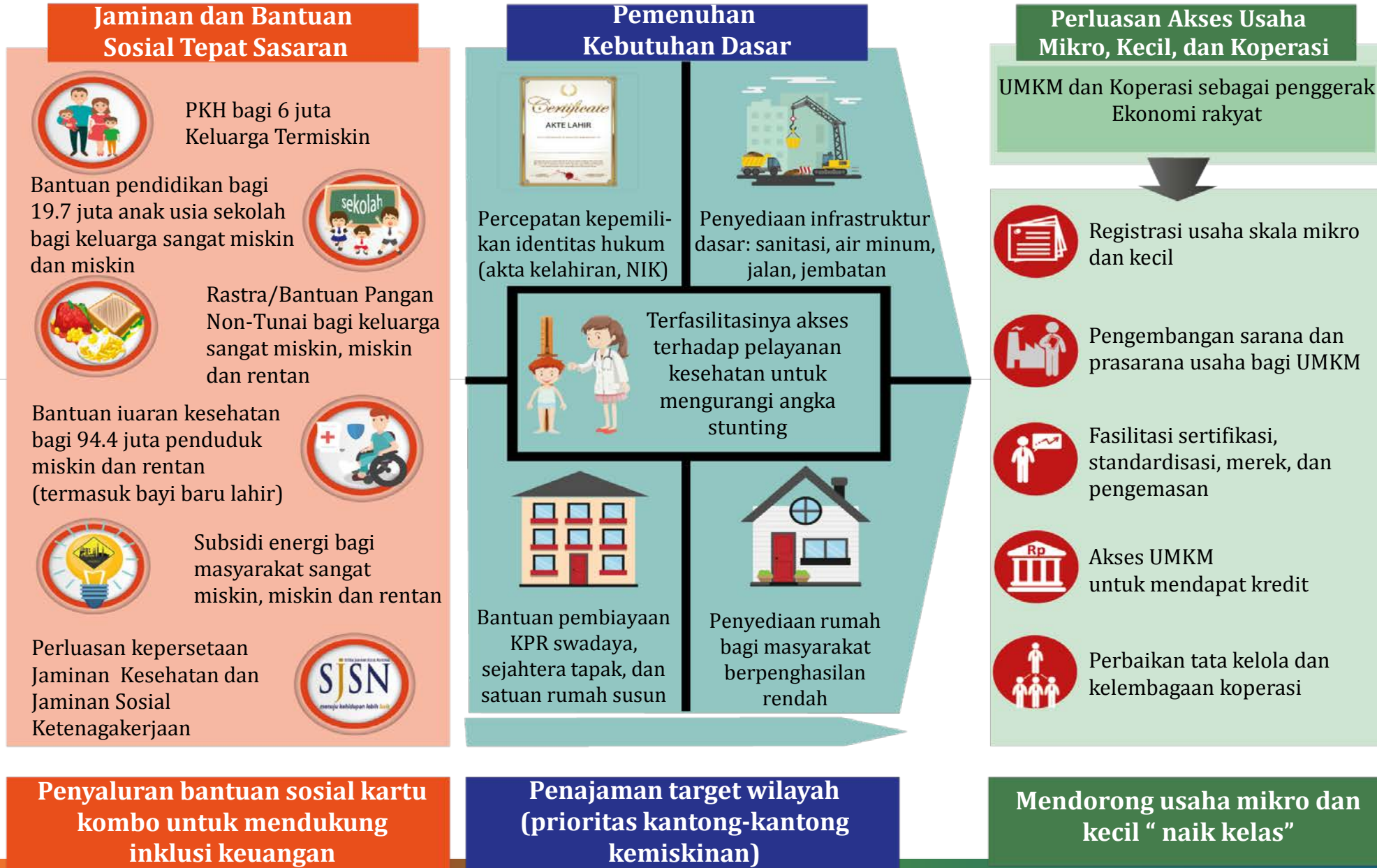
PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA

| KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan Danau Toba | Pengembangan Borobudur dan Sekitarnya | Pengembangan Mandalika | Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas* |
| PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS |
| Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata | Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar | Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang |
| Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata | Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang | Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata | Pembentukan Kelembagaan Destinasi |
| Pembentukan Kelembagaan Destinasi | Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata | Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata | Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata |
| Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata | Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding) | Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding) | Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding) |
| Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding) | Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling) | Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling) | Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk UKM sektor pariwisata (desa wisata dan homestay) |
| Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling) | Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata) | Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata | Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata |
| Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Pariwisata | Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan | Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata) | Penyediaan Regulasi dan Fasilitas untuk Mendorong Investasi di Destinasi Pariwisata |
| Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata) | Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib | Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan | Penyediaan regulasi dan fasilitas untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata |
| Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan | Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata | Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib | Peningkatan aksesibilitas pariwisata (penyediaan sistem dan sarana transportasi darat, laut, udara terintegrasi) |
| Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib | | Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata | |
| Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata | | | |

Pelaksana:
Kementerian Pariwisata, Kemenkeu, KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenLHK, KemenKKP, POLRI, BNPB, Kemendikbud, KemenESDM, BKPM, BPS, Pemda

*7 destinasi prioritas lainnya yaitu Bromo-Tengger-Semeru, Labuan Bajo, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Pulau Morotai, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung

Highlight Kebijakan Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan



Prioritas Pembangunan Infrastruktur: Mendukung Keseluruhan Prioritas Nasional

Penyediaan Pelayanan Dasar

-  Akses Air Minum 100%
-  Akses Sanitasi 100%
-  Rasio Elektrifikasi 96.6%
-  Akses Perumahan Layak Huni
-  Aksesibilitas Perbatasan & Tertinggal
-  Keamanan dan Keselamatan Transportasi
-  Pengendalian Banjir


Infrastruktur Mendukung Sektor Unggulan

Konektivitas


Tol Laut + intermoda

Pengembangan Wilayah/Pusat Pertumbuhan

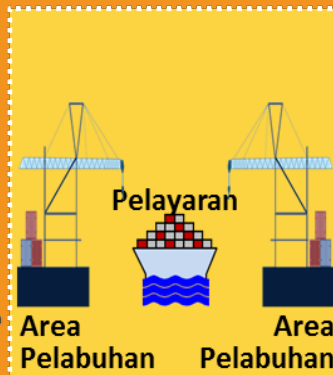
Pengembangan Wilayah/Pusat Pertumbuhan



Kawasan Terbangun




Antarmoda




Tol Laut

Pelayaran

Area Pelabuhan **Area Pelabuhan**



Antarmoda



KTI / Tertinggal

Pembangunan TIK:

- Palapa Ring
- Rencana pita lebar: E-government, E-pendidikan, E-Kesehatan, E-commerce, E-logistik, E-pengadaan


Pembangunan Energi 35 GW

- Sasaran 1.200 kWh/Kap. di 2019 (saat ini Vietnam 1.300 kWh/Kap, Malaysia 4.400 kWh/Kap.)



Sektor Unggulan

 Pertanian

 Industri Pengolahan

 Jasa & Pariwisata




Infrastruktur Perkotaan

-  Membangun Angkutan Massal Berbasis Jalan, Rel & Intermoda
-  Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan

Konsep Pengembangan Transportasi Perkotaan



| <i>Avoid</i> | <i>Shift</i> | <i>Improve</i> |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Jaringan yang Mendukung Efisiensi Perjalanan | Peningkatan Pangsa Angkutan Umum | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi |

-  Mengembangkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan
-  Energi untuk Transportasi Perkotaan
-  Mengembangkan infrastruktur perkotaan melalui pemanfaatan TIK untuk menuju kota cerdas

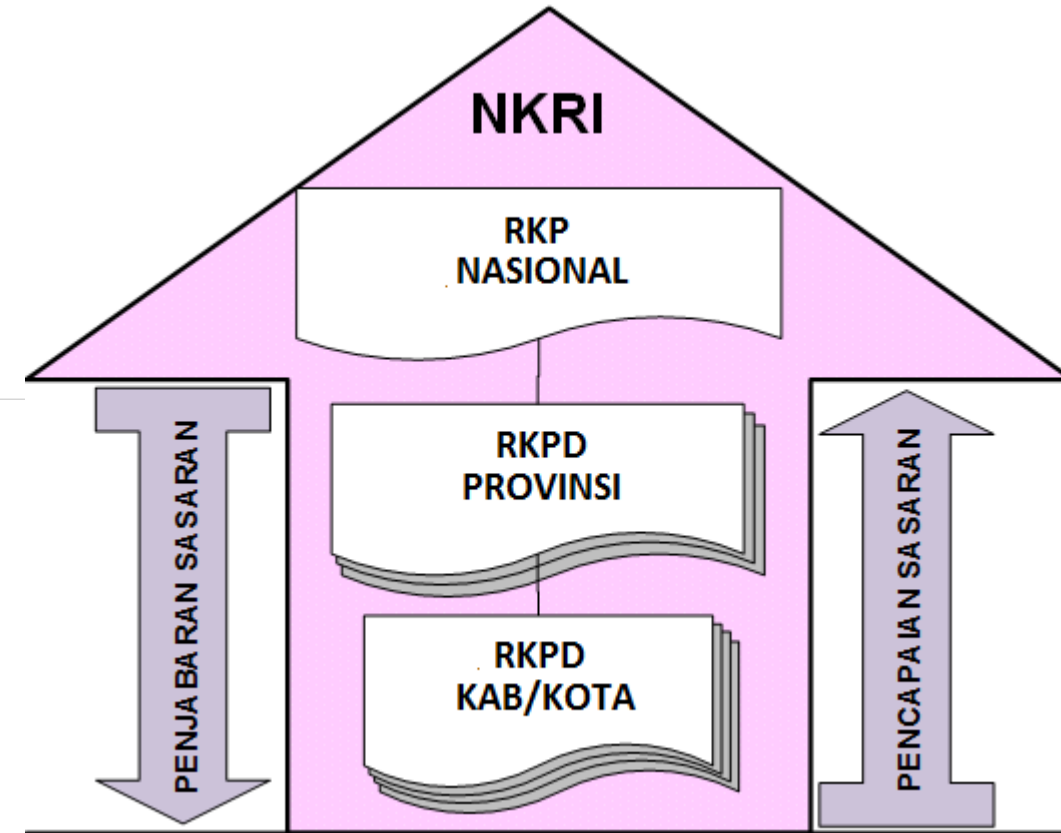
4

Kebijakan Penyelarasan RKPD dengan RKP Tahun 2018

DASAR HUKUM PENYELARASAN

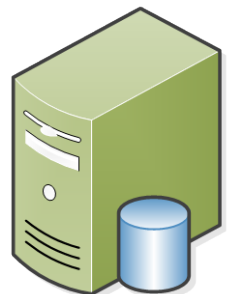
- Pasal 5 ayat (2) UU SPPN, “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya **berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional**, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. “
- Pasal 263 ayat (3) UU Pemda “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan **berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.**”
- Pasal 263 ayat (4) UU Pemda “RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan **berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**”.
- Pasal 272 ayat (3) UU Pemda “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam **rencana strategis perangkat daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **diselaraskan dengan** pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam **rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian** untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”

- **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional** adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan
- Dalam **pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional**, bisa:
 - **Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat**, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll.
 - **Dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.**
- Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya mengandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja.
- Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan.
- Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka **sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.**

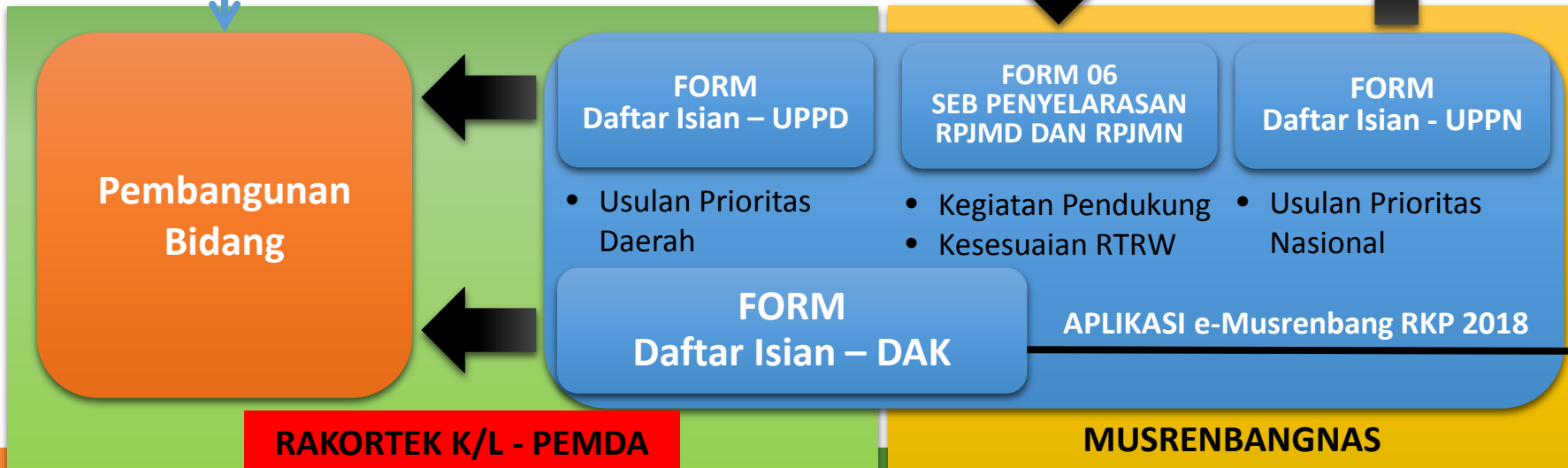
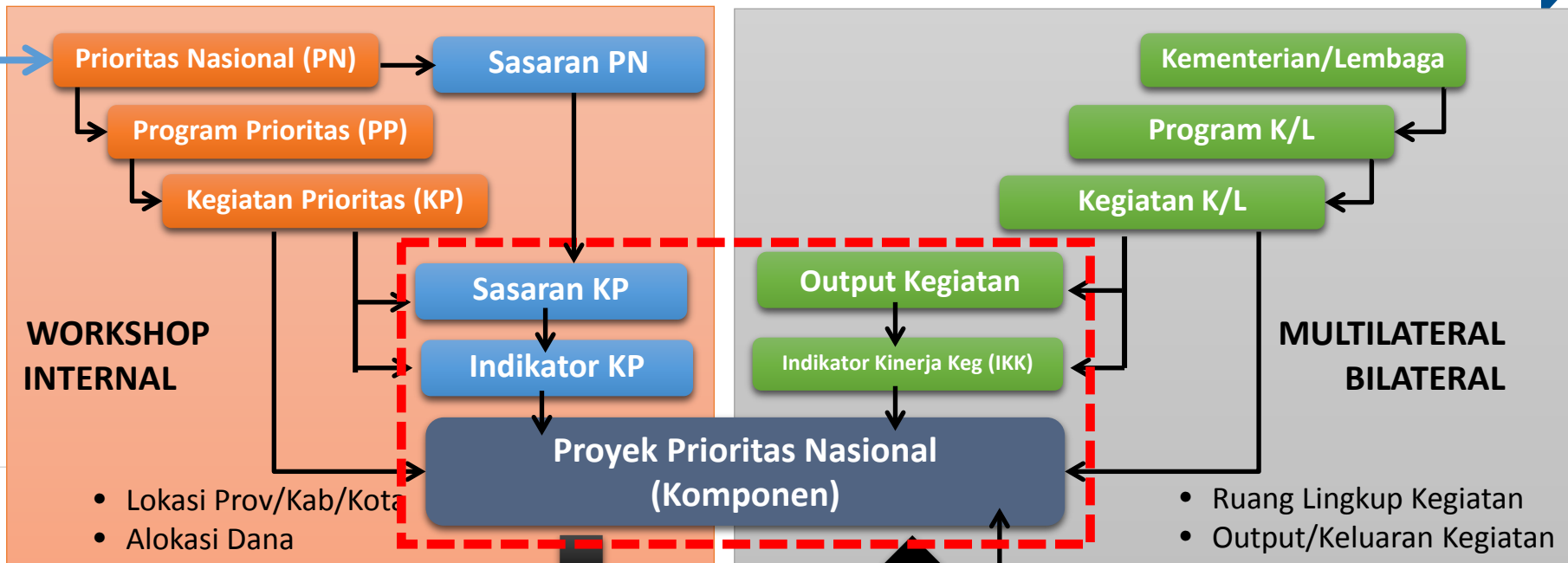


KONSEP PENGEMBANGAN APLIKASI E-PLANNING DAN E-MUSRENBANG SERTA INTEGRASI DENGAN APLIKASI RENJA-KL

APLIKASI e-Planning
RKP 2018



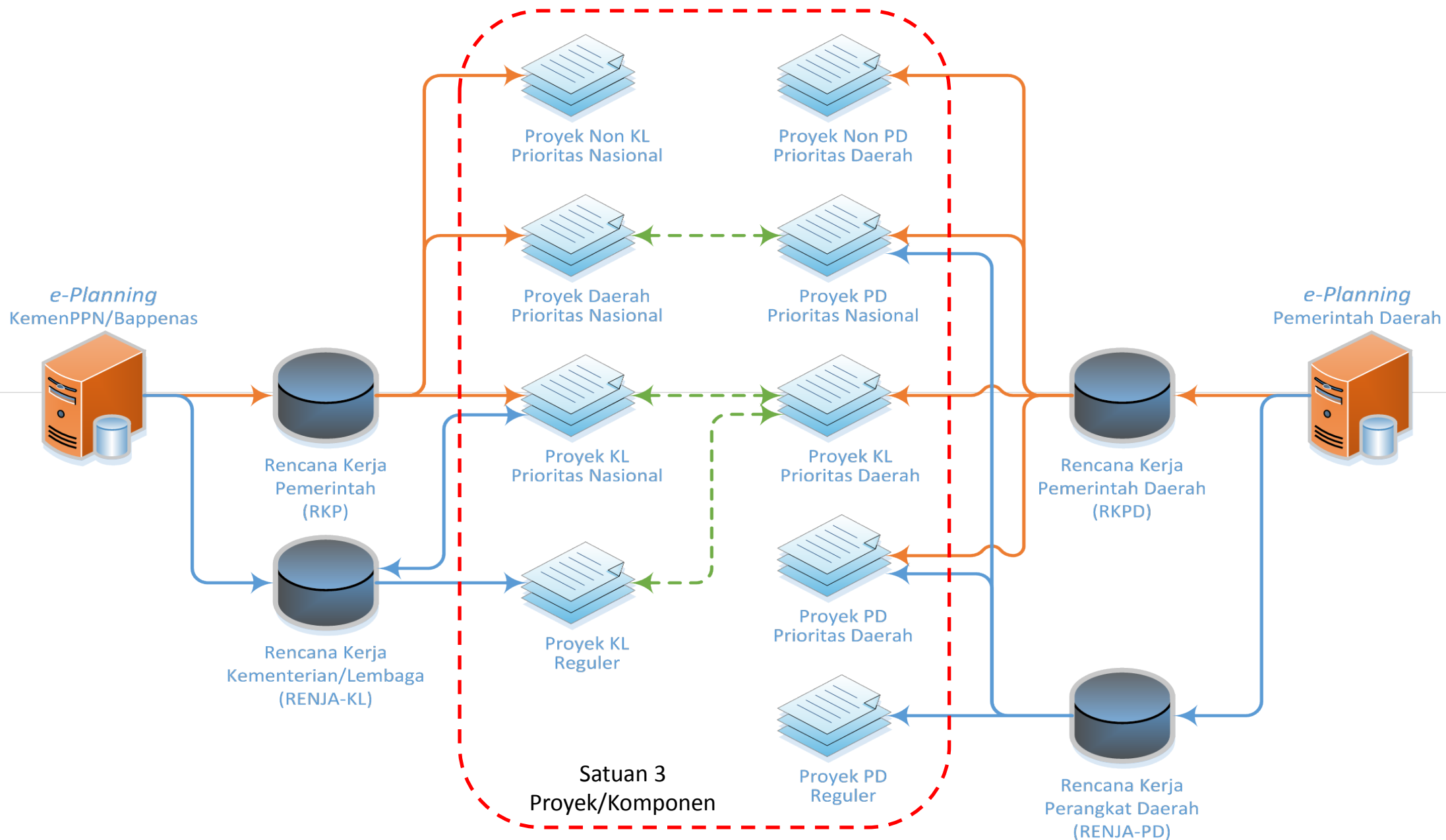
PUSAT



Usulan DAK Penugasan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional



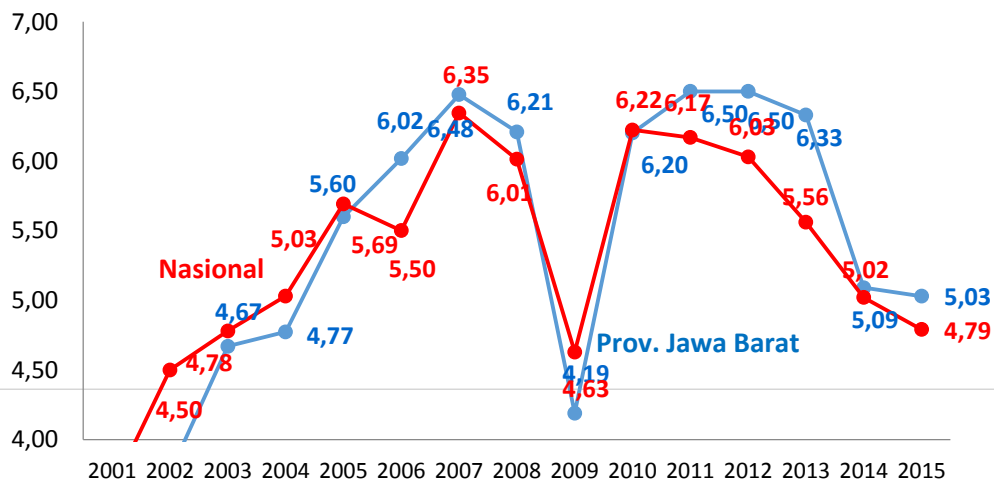
PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH



5

Prioritas Nasional Rancangan Awal
RKP 2018 di Provinsi Jawa Barat

Laju PDRB Provinsi Jawa Barat Vs. PDB (dalam persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Kalkulasi Direktorat Pengembangan Wilayah Bappenas

| No | Provinsi | Tingkat Kemiskinan | | | | Jumlah Kabupaten dengan kemiskinan >= 10% tahun 2015 |
|----|---------------|--------------------|-------|-----------------|-------|------------------------------------------------------|
| | | Realisasi*) | | Proyeksi Target | | |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | DKI Jakarta | 3,93 | 3,75 | 3,50 | 3,23 | 1 |
| 2 | Jawa Barat | 9,53 | 8,95 | 8,68 | 8,32 | 14 |
| 3 | Jawa Tengah | 13,58 | 13,27 | 12,52 | 12,10 | 26 |
| 4 | DI Yogyakarta | 14,91 | 14,05 | 13,80 | 13,63 | 3 |
| 5 | Jawa Timur | 12,34 | 12,05 | 11,49 | 11,06 | 25 |
| 6 | Banten | 5,9 | 5,42 | 5,42 | 5,11 | 1 |
| 7 | Bali | 4,74 | 4,25 | 4,21 | 4,14 | - |

Keterangan: *) Realisasi angka kemiskinan bulan Maret

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 6,1 persen, maka pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat diharapkan dapat tumbuh sebesar **6,1 persen***, dengan tingkat kemiskinan 8,32 persen* dan tingkat pengangguran **4,4 persen***.

Keterangan: *) Proyeksi dalam Rancangan Awal

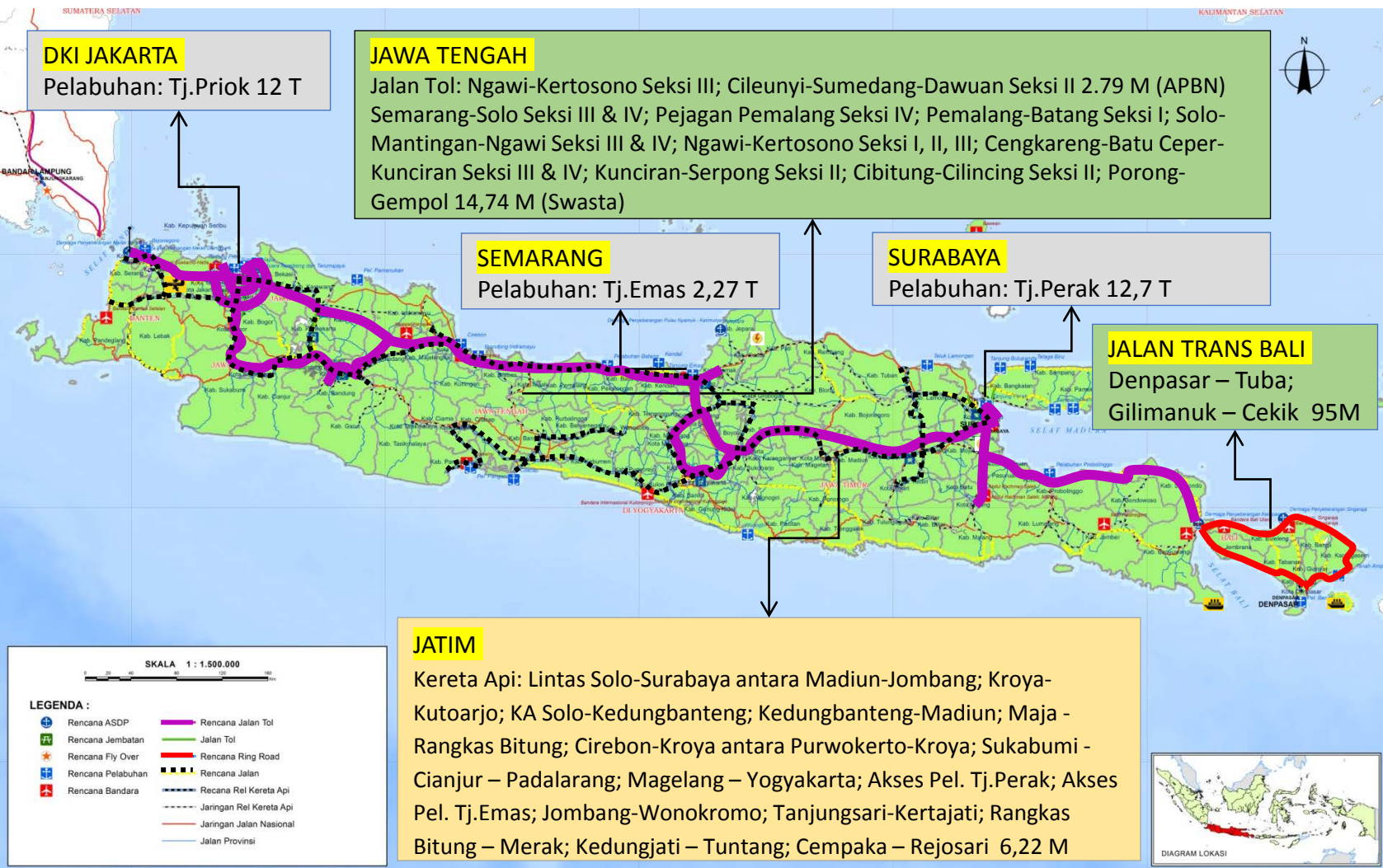
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat didukung oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor pertanian, dan sektor konstruksi dengan kontribusi total lebih dari 70 persen. Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan keempat sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

| Provinsi Jawa Barat | Share ADHB | | | Growth ADHK | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Sektor | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 9,06 | 8,74 | 8,71 | 4,50 | 0,58 | 0,12 |
| 2 Pertambangan dan Penggalian | 2,77 | 2,43 | 1,70 | -1,25 | 1,57 | 0,54 |
| 3 Industri Pengolahan | 43,22 | 43,60 | 43,03 | 7,19 | 5,11 | 4,42 |
| 4 Pengadaan Listrik dan Gas | 0,70 | 0,79 | 0,73 | 8,15 | 4,79 | -8,14 |
| 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 6,50 | 5,95 | 5,88 |
| 6 Konstruksi | 7,87 | 8,12 | 8,25 | 8,15 | 5,45 | 5,98 |
| 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 15,86 | 15,25 | 15,21 | 5,21 | 3,31 | 3,66 |
| 8 Transportasi dan Pergudangan | 4,50 | 4,80 | 5,54 | 4,91 | 7,78 | 9,58 |
| 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,39 | 2,43 | 2,50 | 4,75 | 6,00 | 8,10 |
| 10 Informasi dan Komunikasi | 2,40 | 2,46 | 2,60 | 9,10 | 17,47 | 16,31 |
| 11 Jasa Keuangan dan Asuransi | 2,57 | 2,56 | 2,61 | 12,42 | 4,36 | 7,36 |
| 12 Real Estat | 1,09 | 1,04 | 1,01 | 5,41 | 4,46 | 5,46 |
| 13 Jasa Perusahaan | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 7,79 | 6,92 | 8,15 |
| 14 Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2,40 | 2,32 | 2,41 | -1,39 | 0,46 | 5,38 |
| 15 Jasa Pendidikan | 2,35 | 2,55 | 2,66 | 8,93 | 14,43 | 10,19 |
| 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0,57 | 0,63 | 0,70 | 6,61 | 15,78 | 14,14 |
| 17 Jasa lainnya | 1,77 | 1,82 | 1,85 | 7,88 | 8,80 | 8,96 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 6,33 | 5,09 | 5,03 |



Highlight Proritas Nasional di Provinsi Jawa Barat

Jalur Utama Logistik Pulau Jawa-Bali



Proyeksi pertumbuhan ekonomi pulau Jawa dengan terselenggaranya tol laut, dalam jangka pendek (2019) 8,12% dan dalam jangka panjang (2039) 7,99%

Terselenggaranya Tol Laut akan meningkatkan kapasitas layanan Pel. Tanjung Priok dan Tanjung Perak sehingga dapat melayani kapal 4rb TEU's, serta Pel. Tanjung Emas sehingga dapat melayani kapal 2,5rb TEU's.

Pembangunan Jalan dan Kereta Api Lintas (Trans) Jawa-Bali akan meningkatkan efisiensi disbtribusi logistik yang disebabkan oleh tingginya kapasitas layanan yang diberikan.



HIGHLIGHT INDIKASI AWAL ALOKASI KEGIATAN *)

PROGRAM PRIORITAS : PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI (DARAT, LAUT, UDARA, DAN INTER-MODA)**Kegiatan Prioritas : Konektivitas**

| Proyek Prioritas Nasional | Proyek KL | Instansi Pelaksana | Program | Kegiatan | Output | Lokasi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik | Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Phase II Dan III | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Pembangunan Jalan Bebas Hambatan | Provinsi Jawa Barat |
| Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Bandara/Pelabuhan/Terminal Mendukung Integrasi Antar Moda | Pembangunan Jalur KA Tanjungsari-Kertajati (AMDAL) | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian | Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api | Studi/Kajian/DED/STD/Amdal/Norma /Standar/Pedoman/Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana KA | Provinsi Jawa Barat |
| Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik | Pembangunan Pelabuhan Patimban | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas utama pelabuhan laut | Kab. Subang |
| Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Bandara/Pelabuhan/Terminal Mendukung Integrasi Antar Moda | Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Pembangunan Jalan | Kab. Subang |
| Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik | Pembangunan Bandar Udara Kertajati | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Peningkatan Kapasitas Bandar Udara | Kab. Majalengka |
| Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Bandara/Pelabuhan/Terminal Mendukung Integrasi Antar Moda | Pembangunan Jalan Akses Bandara Kertajati | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Pembangunan Jalan | Kab. Majalengka |

Kegiatan Prioritas : Aksesibilitas

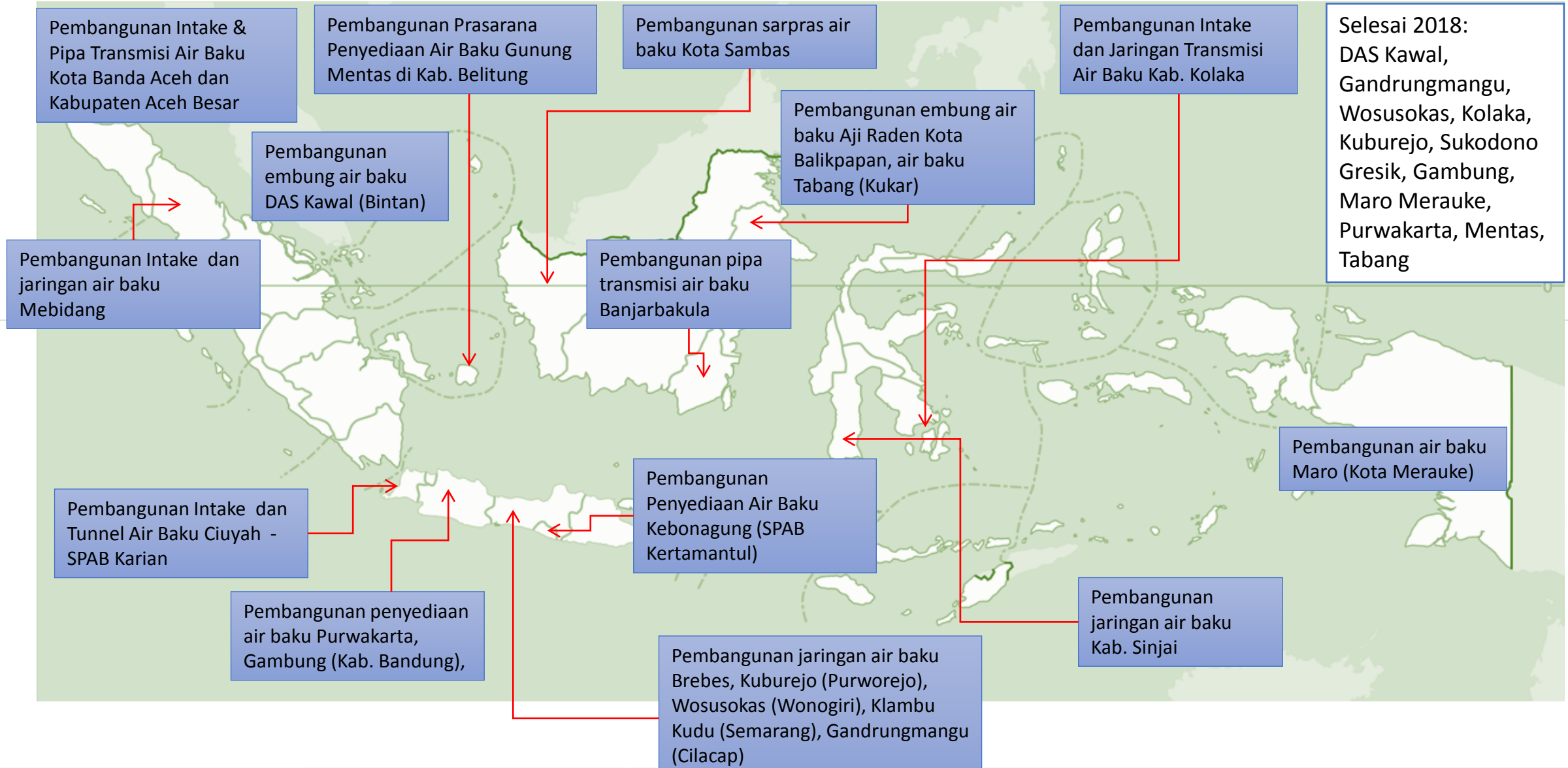
| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Daerah Tertinggal | Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa Barat Ruas Pameungpeuk-Cipatujuh-Kelapagene | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Pembangunan Jalan | Provinsi Jawa Barat |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|

Kegiatan Prioritas : Transportasi Perkotaan

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Pengembangan Kota dengan Sistem Angkutan Umum Berbasis Rel Mendukung Angkutan Umum Perkotaan | Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line (PHLN-Prancis) | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian | Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api | Jalan Rel | Kab. Bandung |
| Pengembangan Kota dengan Sistem Angkutan Umum Berbasis Rel Mendukung Angkutan Umum Perkotaan | Pembangunan Jalur Ganda KA Padalarang - Cicalengka | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian | Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api | Jalan Rel | Kota Bandung |

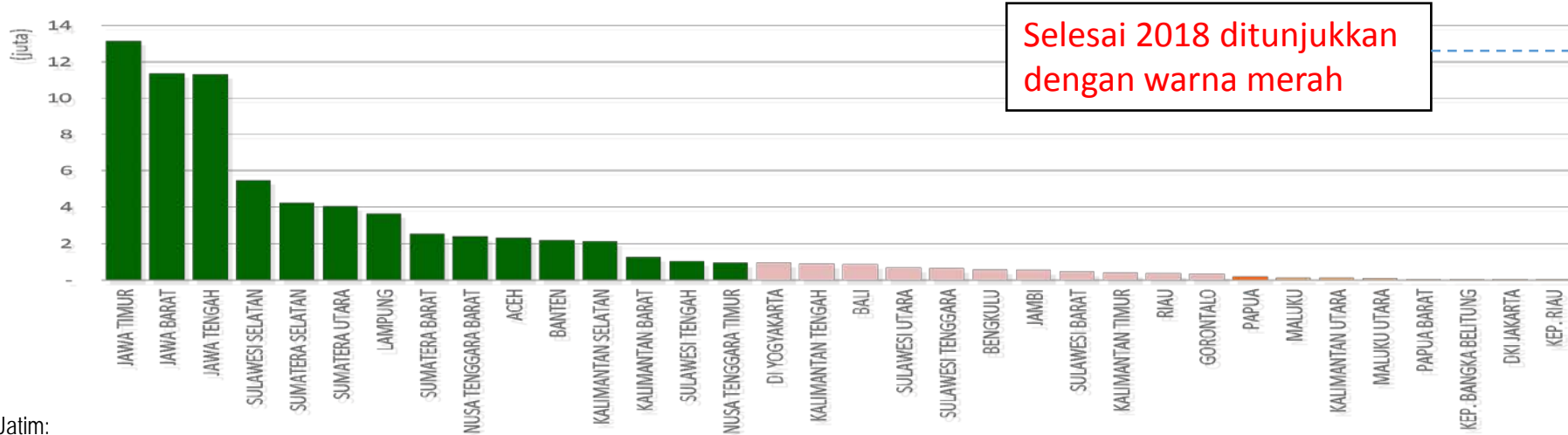
*) Disampaikan sebagai Rancangan Kegiatan Konektivitas dan disampaikan pula pada Rakortek minggu ke-3 dan ke-4 Februari 2017

KEGIATAN PRIORITAS PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU TAHUN 2018





KEGIATAN PRIORITAS IRIGASI PADA SENTRA PRODUKSI PADI TAHUN 2018



Selesai 2018 ditunjukkan dengan warna merah

- Jateng:
1. Rehab D.I. Sidorejo (Kab. Grobogan)
 2. Rehab D.I. Klambu (Kab. Demak)
 3. Rehab D.I. Sedadi (Kab. Grobogan)
 4. Rehabilitasi DI. Pemali (27.482 ha)
 5. Rehab DI Colo
 6. Rehab Drainase Sistem DI. Kalibawang
 7. Rehab DI Kedung Puteri (Purworejo)
 8. Rehab DI Grogek /Sungapan (Pemalang 7.064 ha)
 9. Pembangunan tampungan air suplesi DI Dumpil (Grobogan)

- Jatim:
1. Rehab D.I. Pacal (Kab. Bojonegoro)
 2. Rehab D.I. Prijetan (Kab. Lamongan)
 3. Rehab D.I. Gondang (Kab. Lamongan)
 4. Pembangunan Lumbung Air Sukodono (Kab. Gresik)
 5. Rehab D.I. Delta Brantas (Kab. Sidoarjo)
 6. Rehab D.I. Baru (Kab. Banyuwangi, 15.910 Ha)
 7. Rehab D.I. Sampean Baru (Kab. Bondowoso)
 8. Rehab Bendung Sungkur
 9. Rehabilitasi DI Sampean Lama (Kab. Situbondo)

- Jabar:
1. Pembangunan D.I. Rengrang (Kab. Sumedang)
 2. Modernisasi Jaringan Irigasi Sekunder D.I. Rentang (Kab. Majalengka, Cirebon dan Indramayu)
 3. Pembangunan DI. Leuwigoong (Kab. Garut)
 4. Rehab D.I. Manganti (Sl. Lakkok Selatan 4600 Ha)
 5. Rehab DI Cikunten I dan II

- Sulsel:
1. Pembangunan Bendung D.I. Baliase (Kab. Luwu Utara)
 2. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Baliase Kanan 2 dan Baliase Kiri (Kab. Luwu Utara)
 3. Rehab D.I. Kaleana I,II,III (Kab. Luwu Timur)
 4. Rehab D.I Palakka (Kab. Bone)
 5. Rehab D.I Pattiro (Kab. Bone)
 6. Rehab D.I Pamukkulu (Kab. Takalar)

- Sumut:
1. Pembangunan Bendung D.I. Sei Wampu (Kab. Langkat)
 2. Rehab D.I. Sei Ular (Kab. Deli Serdang dan Serdang Bedagai)
 3. Pembangunan Bendung DI Sittakurak (Tapanuli Tengah, 1000 ha)
 4. Pembangunan Bendung DI Sidilanitano
 5. Pembangunan Bendung Sei Padang

- Sumbar:
1. Pembangunan D.I. Batang Sinamar (Kab. Tanah Datar)
 2. Pembangunan DI Kawasan Sawah Laweh Tarusan (3.723 ha)

- Kalsel:
1. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Alai
 2. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Pitap
 3. Pembangunan DI Amandit (Kab. Hulu Sungai Selatan)

- Aceh:
1. Pembangunan Bendung dan Saluran Penyambung DI. Kr.Pase (Aceh Utara, 9.000 ha)
 2. Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan (3.028 Ha di Kab. Aceh Utara dan Aceh Timur)
 3. Pembangunan DI Lhok Guci (Aceh Barat 1000ha)

- Lampung:
1. Pembangunan dan SS D.I. Jabung
 2. Pembangunan SS Way Besai Kab Way Kanan (7.500 ha)

- Banten:
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pamarayan Utara

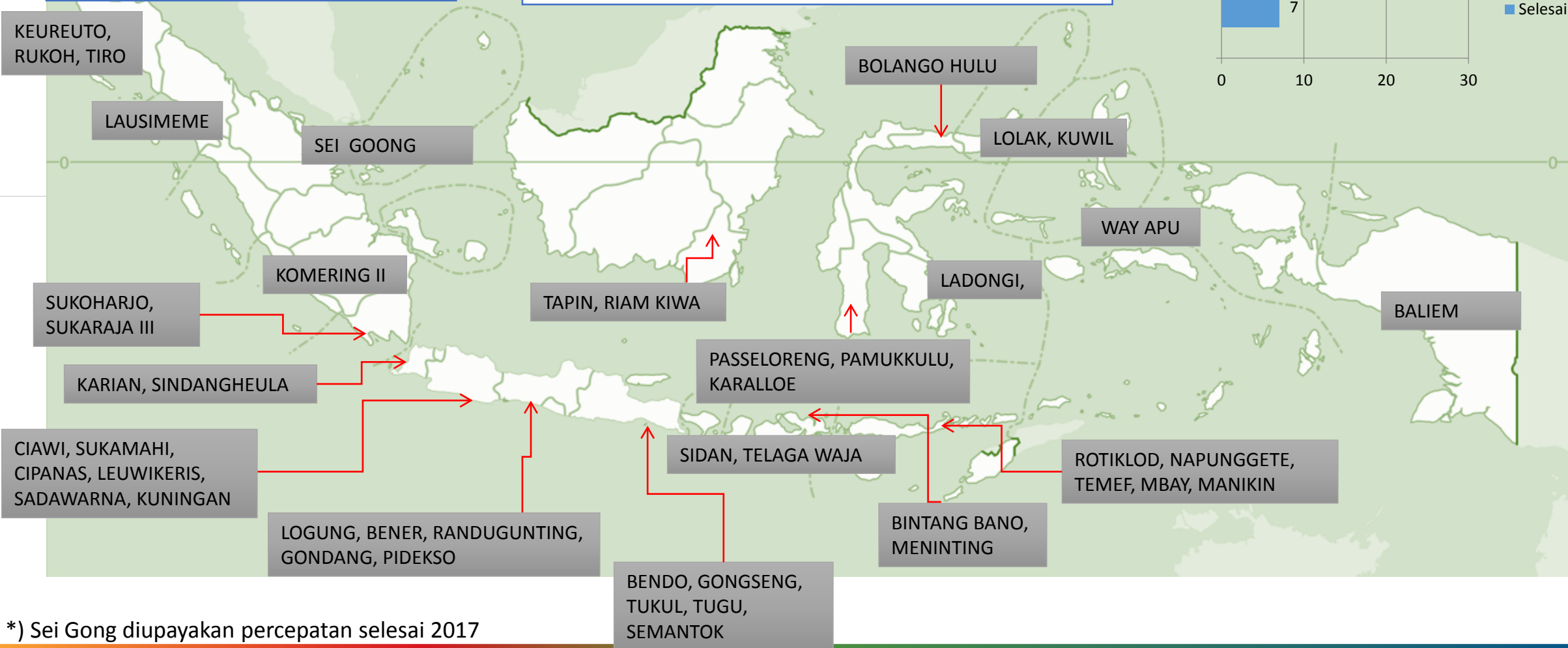
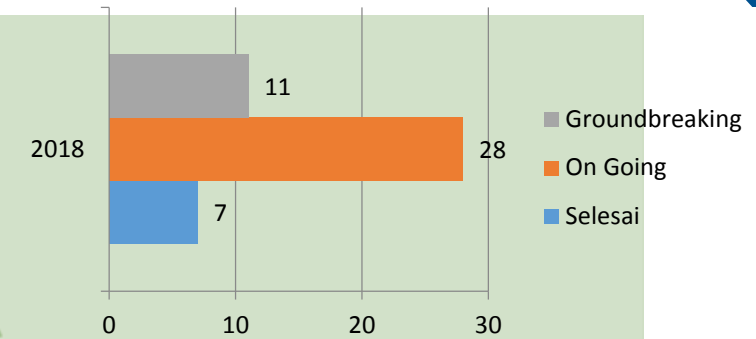
- Sulteng:
1. Rehab D.I. Gumbasa Kab.Sigi
 2. Rehab D.I. Sausu Atas Kab.Parigi Moutong

- Sumsel:
1. Pembangunan D.I. Lematang (Kota Pagar Alam)
 2. Pembangunan D.I. Komerling (Kab. OKU Timur, 3.112 ha)
 3. Review Desain, AMDAL, LARAP sistem interkoneksi DI Bumi Agung dan Tulung Mas (7.299 ha)

RENCANA PEMBANGUNAN WADUK TAHUN 2018

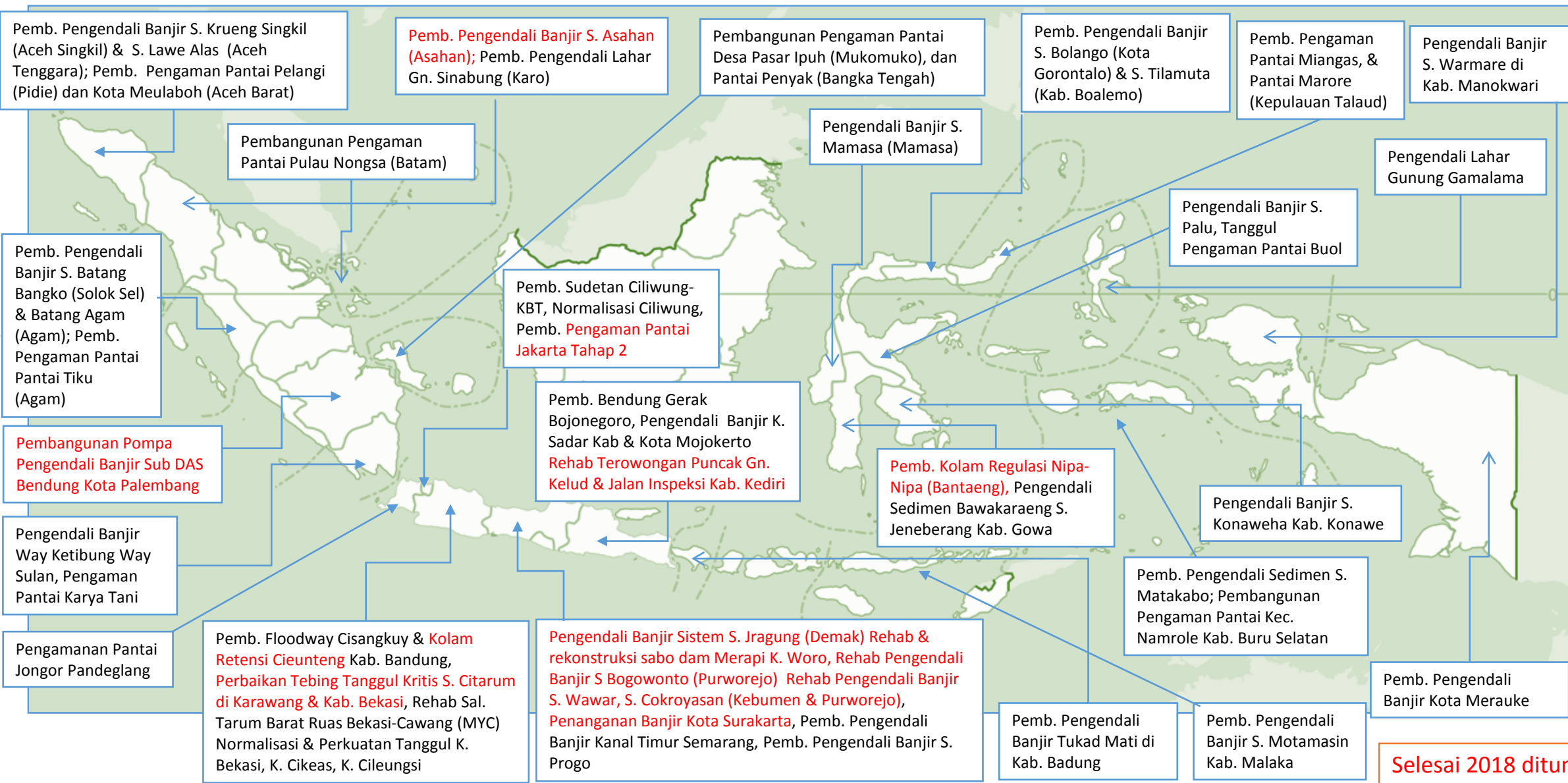
Selesai 2017: Marangkayu, Raknamo, Tanju, Mila

Selesai 2018: Kuningan, Tugu, Logung, Gondang, Rotiklod, Bintang Bano, Sei Gong*



*) Sei Gong diupayakan percepatan selesai 2017

KEGIATAN PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2018

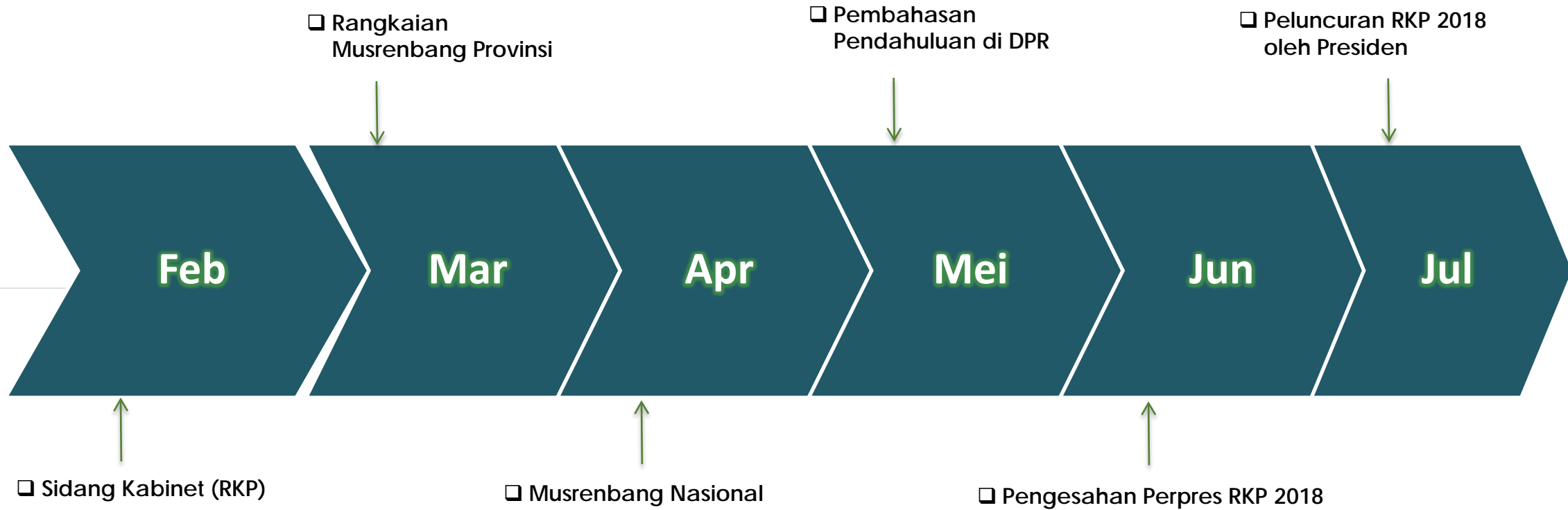


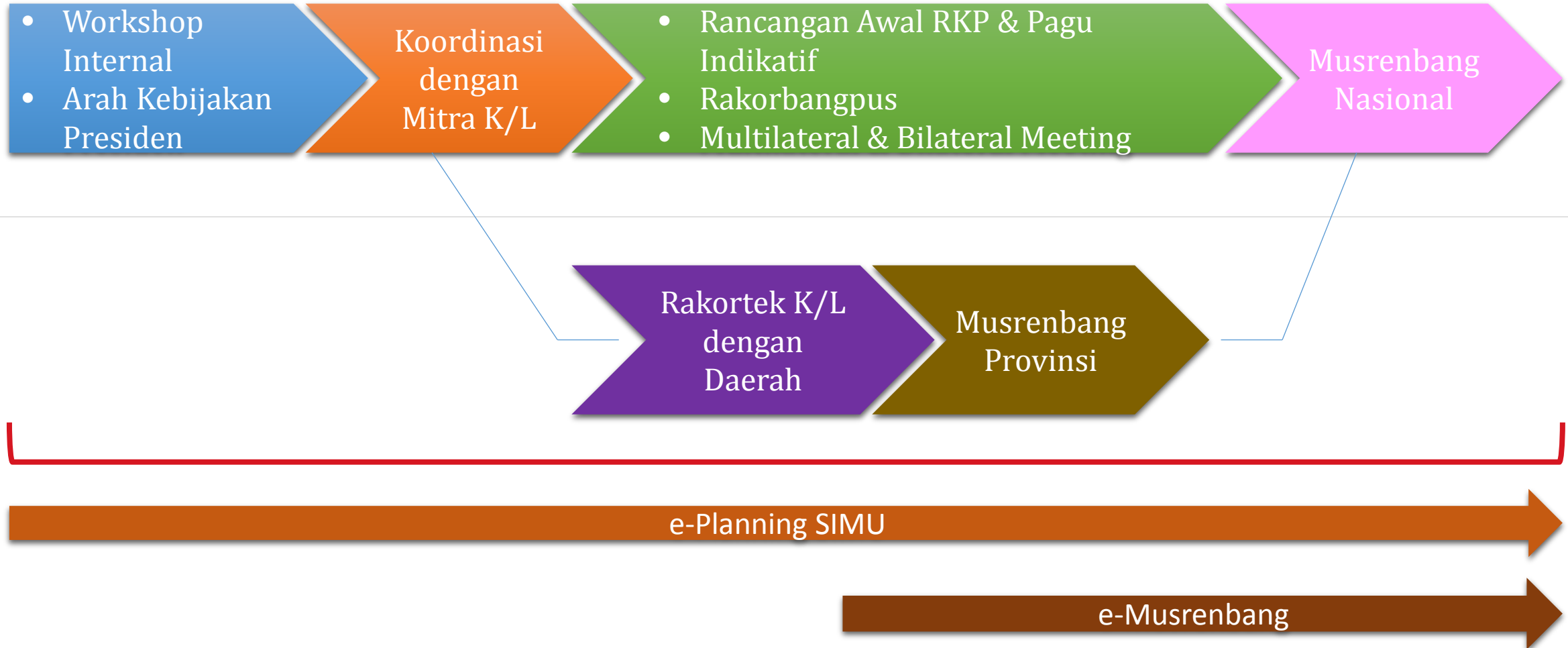
Selesai 2018 ditunjukkan dengan warna merah

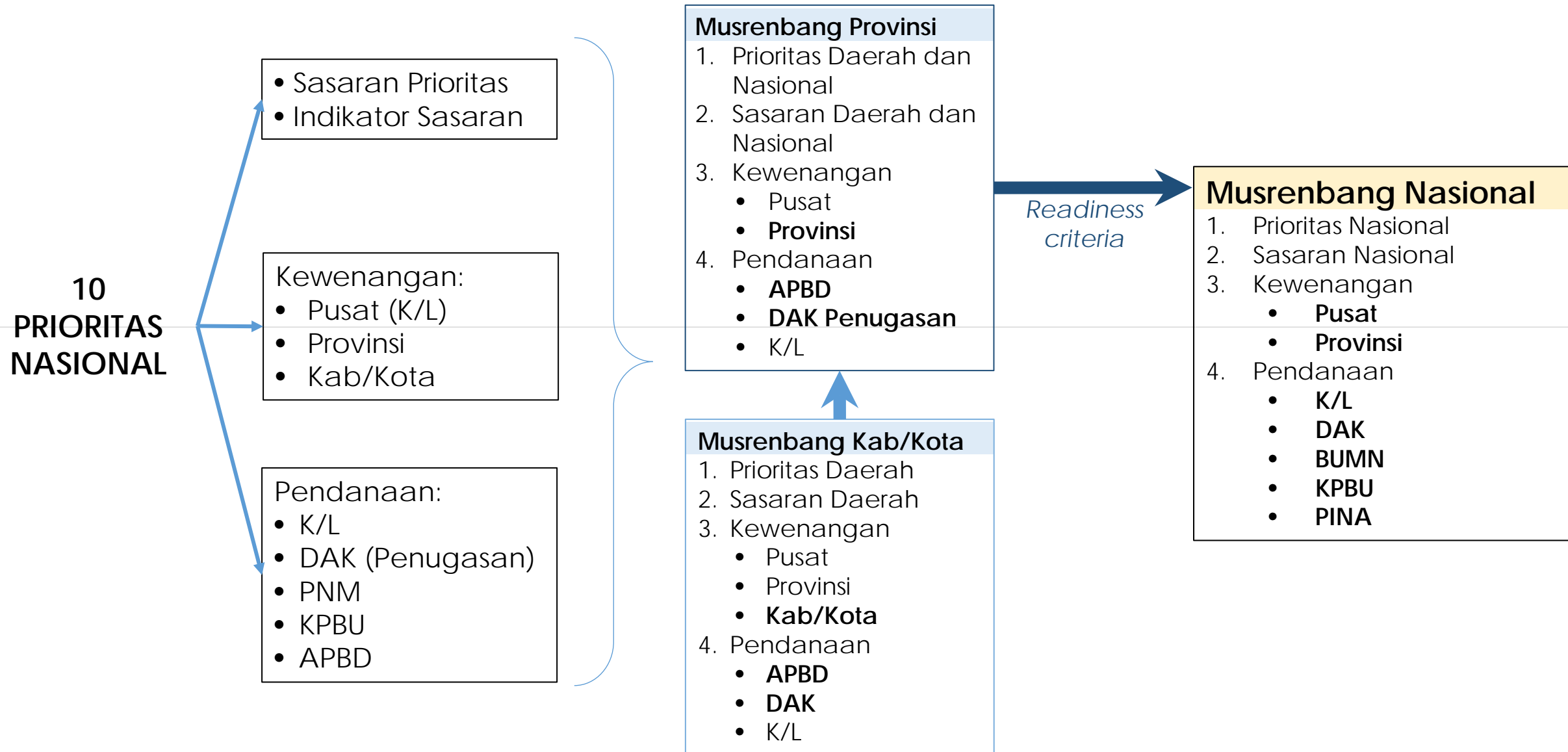
6

Penutup

Tahapan Penyusunan RKP 2018 (Desember 2016 – Juli 2017)







- ❑ **Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional** adalah alat untuk mencapai tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan. Dalam **pencapaian sasaran** dan **prioritas pembangunan nasional**, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll. Selain itu juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka **sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.**
- ❑ Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Jawa Barat perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan:
 - ❑ Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan)
 - ❑ Perkuatan DAK penugasan dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional
- ❑ Seluruh hasil kesepakatan pelaksanaan rangkaian Musrenbang Provinsi Jawa Barat agar dapat digunakan dalam pembahasan Rakortek Pusat dan Daerah serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2018.



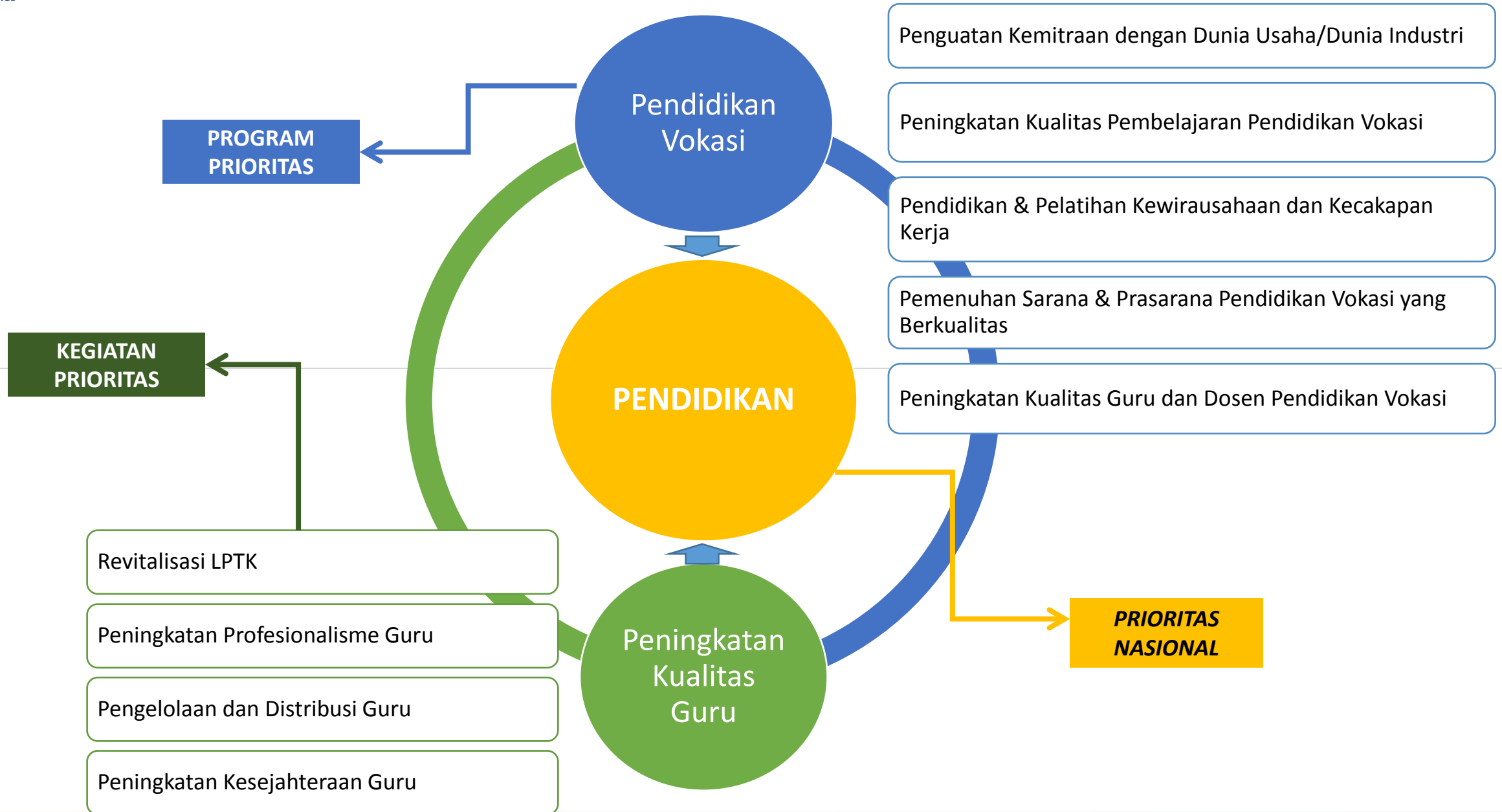
6 Lampiran



Kementerian PPN/
Bappenas

1. Prioritas Nasional Pendidikan

Prioritas Nasional Pendidikan



PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri | Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi | Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja | Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas | Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Proyek Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta | Proyek Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi | Proyek Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja | Proyek Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi | Proyek Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Pendidik Vokasi |
| Proyek Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta | Proyek Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi | | Proyek Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi | |
| Proyek Pengembangan Sistem Insentif/Regulasi untuk Mendorong Peran Industri/Swasta dalam Pendidikan Vokasi | Proyek Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi | | | |
| Proyek Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi | | | | |

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Revitalisasi LPTK | Peningkatan Profesionalisme Guru | Pengelolaan dan Distribusi Guru | Peningkatan Kesejahteraan Guru |

| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proyek Peningkatan Kapasitas LPTK | Proyek Peningkatan Kompetensi Guru | Proyek Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru | Proyek Penyediaan Tunjangan Guru |
| | Proyek Penilaian Kinerja Guru | Proyek Pemenuhan Guru di daerah 3T | Proyek Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru |
| | Proyek Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru | | |
| | Proyek Sertifikasi Guru | | |



2. PRIORITAS NASIONAL KESEHATAN

Prioritas Nasional Kesehatan



Rancangan Program Prioritas: Kesehatan

PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Perbaiki Kualitas Gizi Ibu dan Anak | Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan | Penurunan <i>Stunting</i> | Pemenuhan JKN/KIS |
| | | Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas |
| | | Pemenuhan SDM kesehatan |
| | | Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan |

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS | Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular | Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap |
| Pengendalian Malaria | | |
| Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ <i>Neglected Tropical Diseases</i> | | |

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PREVENTIF DAN PROMOTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Peningkatan lingkungan sehat | Peningkatan pemahaman hidup sehat | Peningkatan konsumsi pangan sehat |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat | Kampanye Hidup Sehat | Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat |



3. PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

PN Perumahan dan Permukiman



PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK

Kegiatan Prioritas

**Penciptaan Iklim Kondusif
Penyediaan Rumah MBR**

Kegiatan Prioritas

**Penataan Penyediaan
dan Peningkatan
Kualitas Perumahan
MBR**

Kegiatan Prioritas

**Fasilitasi Pembiayaan
Perumahan MBR**

Kegiatan Prioritas

**Peningkatan Kualitas dan
Penyediaan Infrastruktur
Dasar Permukiman**

Proyek Prioritas

Reformasi administrasi
pertanahan dan perizinan
pembangunan perumahan

Peningkatan pembinaan dan
pengawasan standar
bangunan gedung

Pengembangan sistem
informasi bantuan
perumahan

Proyek Prioritas

Penyediaan rumah susun
beserta PSU

Penyediaan rumah khusus
beserta PSU

Fasilitasi penyediaan
rumah swadaya beserta
PSU

Proyek Prioritas

Fasilitasi pembiayaan
perumahan sisi *demand*

Fasilitasi pembiayaan
perumahan sisi *supply*

Proyek Prioritas

Perencanaan perumahan dan
kawasan permukiman

Pengembangan infrastruktur
kawasan permukiman

Keterangan:

PSU: Prasarana Sarana Utilitas

MBR: Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PROGRAM PRIORITAS AIR BERSIH DAN SANITASI

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi

Kegiatan Prioritas

Peningkatan Ketersediaan Air Baku

Proyek Prioritas

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat terkait air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah

Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang terintegrasi terutama di daerah dengan akses rendah

Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi terutama di daerah dengan akses rendah

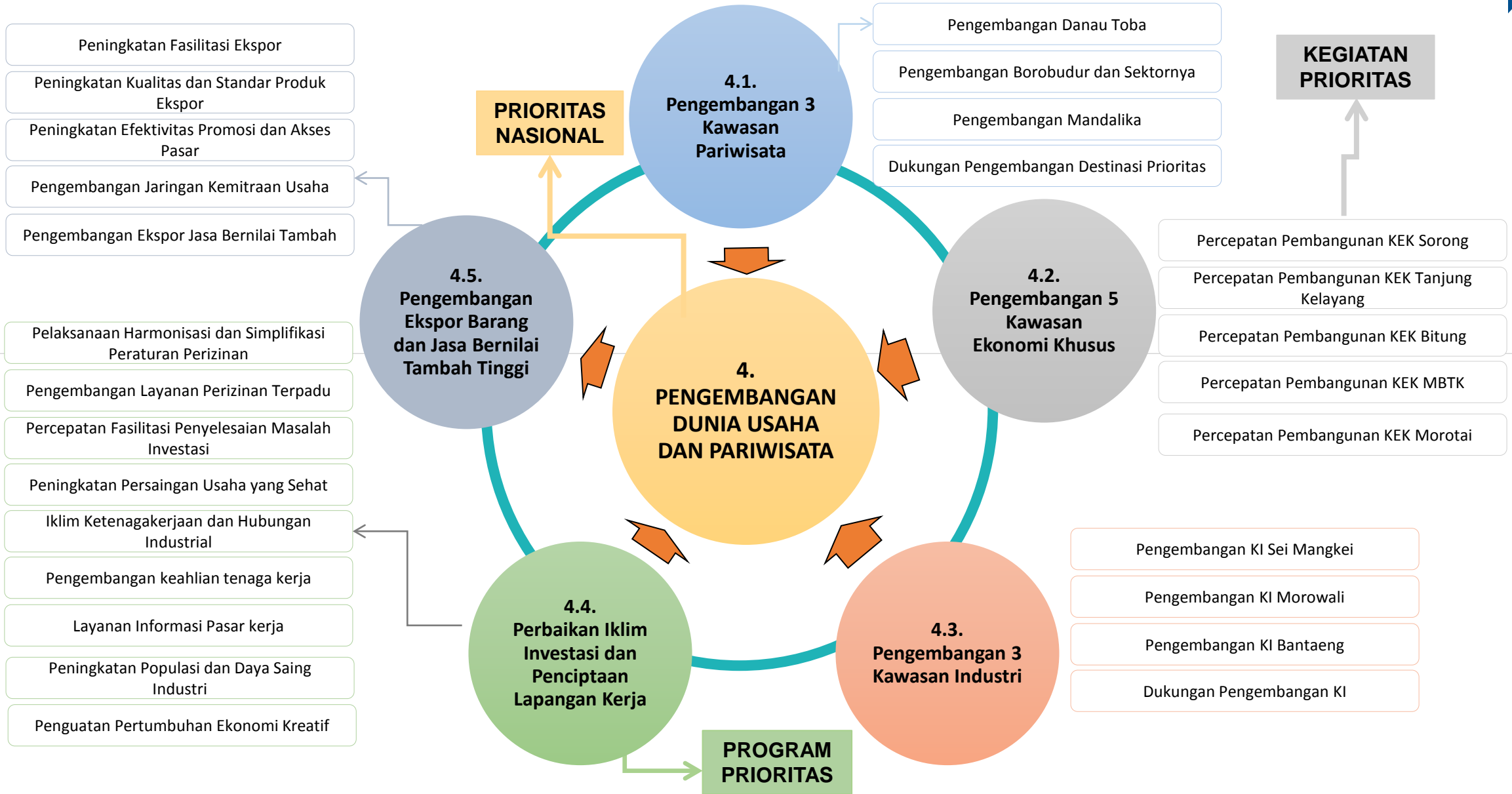
Proyek Prioritas

Jaga Air : Peningkatan ketahanan sumber daya air domestik di 15 DAS prioritas

Simpan Air : Peningkatan ketersediaan dan kuantitas air di kota-kota besar dan metropolitan



4. PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA



Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN PARIWISATA

| KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan Danau Toba | Pengembangan Borobudur dan Sekturnya | Pengembangan Mandalika | Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas |
| PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS |
| Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pembangunan Infrastruktur Dasar | Pembangunan Infrastruktur Dasar | Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang |
| Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata | Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata | Peningkatan Aksesibilitas Pariwisata | Pembentukan Kelembagaan Destinasi |
| Pembentukan Kelembagaan Destinasi | Penyusunan Masterplan Terpadu dan Rencana Rinci Tata Ruang | Pembentukan Kelembagaan Destinasi | Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata |
| Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata | Pembentukan Kelembagaan Destinasi | Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata | Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding) |
| Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding) | Penumbuhan Inovasi Produk dan Kapasitas Daya Tarik Pariwisata | Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding) | Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling) |
| Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling) | Peningkatan Citra Pariwisata Indonesia di dalam dan luar Negeri (branding) | Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling) | Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata |
| Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata | Peningkatan Akses Informasi dan Pemasaran Produk Wisata (Advertising dan Selling) | Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata | Penyediaan Regulasi dan Fasilitas untuk Mendorong Investasi di Destinasi Pariwisata |
| Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata) | Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata) | Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Produk dan Jasa UMKM (Homestay dan Desa Wisata) | Penyediaan Statistik Pariwisata Nasional |
| Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan | Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan | Penciptaan Destinasi Wisata Bersih, Sehat dan Berkelanjutan | |
| Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib | Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib | Penciptaan Destinasi Wisata yang Aman dan Tertib | |
| Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata | Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata | Mitigasi Bencana dan Risiko lain di Destinasi Wisata | |

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 5 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS |
| Percepatan Pembangunan KEK Sorong | Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang | Percepatan Pembangunan KEK Bitung |
| PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS |
| Percepatan Pembangunan KEK Sorong | Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang | Percepatan Pembangunan KEK Bitung |
| KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | |
| Percepatan Pembangunan KEK MBTK | Percepatan Pembangunan KEK Morotai | |
| PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | |
| Percepatan Pembangunan KEK MBTK | Percepatan Pembangunan KEK Morotai | |

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan 3 Kawasan Industri

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI (KI)

| KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Pengembangan KI Sei Mangkei | Pengembangan KI Morowali | Pengembangan KI Bantaeng | Dukungan Pengembangan Kawasan Industri |
| PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS |
| Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI | Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI | Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI | Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI |
| Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi | Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi | Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi | Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi |
| Pembebasan Lahan | Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI | Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI | Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI |
| Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI | Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI | Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI | Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI |
| Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI | Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK | Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK | |
| Peningkatan Jumlah dan Kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi, Akademi Komunitas, dan BLK | Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI | Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI | |
| Fasilitasi Penumbuhan Industri di dalam KI | | Penyediaan Insentif KI | |

Rancangan Program Prioritas: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (1)

PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

KEGIATAN PRIORITAS

Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu

KEGIATAN PRIORITAS

Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan peringkat EoDB

Harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi peraturan perizinan tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah

Perubahan regulasi pusat dan daerah yang menghambat investasi

PROYEK PRIORITAS

Pengembangan sistem perizinan nasional

Pembentukan PTSP dan pelimpahan kewenangan perizinan kepada PTSP daerah

PROYEK PRIORITAS

Percepatan penyusunan RTRW dan RDTR khususnya di kawasan strategis

Penyelesaian pengaduan masalah investasi

Perkuatan Data dan Informasi Investasi

PROYEK PRIORITAS

Pencegahan terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

Pengawasan kegiatan usaha yang sesuai dengan mekanisme persaingan usaha yang sehat

Penegakan hukum terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat

Rancangan Program Prioritas: Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (2)

PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

| KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri | Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif | Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial | Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja | Layanan Informasi Pasar Kerja |
| PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Penguatan ekosistem dan daya tahan industri | Penguatan Ekosistem Pengembangan Ekonomi Kreatif | Percepatan Penyempurnaan UU Ketenagakerjaan (harmonisasi UU 13/2003 dengan SJSN) | Pembangunan bengkel pelatihan bersama (<i>workplace</i>) di 20 Kabupaten/Kota | Layanan Informasi Pasar Kerja di Kawasan Industri |
| Peningkatan desain, standardisasi mutu, kualitas produk | Peningkatan Akses Pembiayaan dan Layanan Keuangan | Kemitraan Peningkatan Kapasitas Pelaku Hubungan Industrial | Skema Dana Pengembangan Pelatihan | |
| Penumbuhan populasi industri | Penguatan Rantai Nilai dan Peningkatan Akses Pasar | Penguatan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan | | |
| Pembaharuan permesinan industri | Dukungan Infrastruktur bagi Pelaku Ekonomi Kreatif | | | |
| Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri | | | | |

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa (1)

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Fasilitas Ekspor

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Kualitas dan Standar
Produk Ekspor

KEGIATAN PRIORITAS

Peningkatan Efektivitas Promosi
dan Akses Pasar

PROYEK PRIORITAS

Publikasi dan sosialisasi
mengenai perundingan
perdagangan internasional

Pengembangan sistem fasilitas
pembiayaan perdagangan

Kerjasama pengembangan ekspor

Fasilitasi kebijakan perdagangan

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan kualitas produk
UMKM dan koperasi

Penyediaan sistem informasi
ketentuan standard di negara
mitra

Peningkatan infrastruktur mutu

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan citra produk Indonesia
(branding)

Penyediaan informasi dan analisa
pasar ekspor

Promosi dagang dalam dan luar
negeri

Peningkatan akses pasar

Rancangan Program Prioritas: Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa (2)

PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Jaringan
Kemitraan Usaha

PROYEK PRIORITAS

Fasilitasi kemitraan rantai
nilai/pasok

KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan Ekspor Jasa
Bernilai Tambah

PROYEK PRIORITAS

Pendampingan pasar jasa

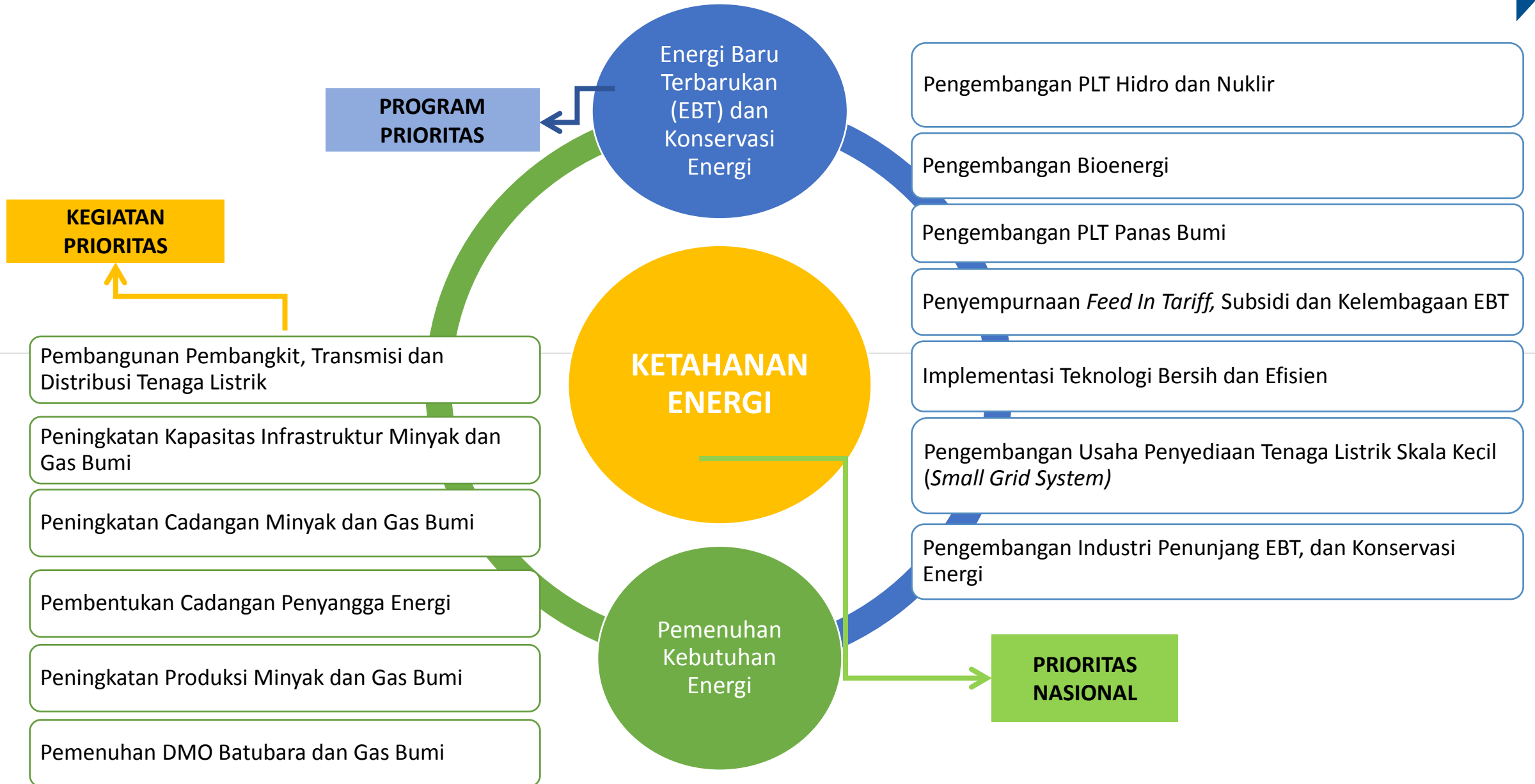
Kebijakan pendukung
pengembangan jasa



Kementerian PPN/
Bappenas

5. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI

KETAHANAN ENERGI



PROGRAM PRIORITAS ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) DAN KONSERVASI ENERGI

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro dan Nuklir | Pengembangan PLT Panas Bumi | Pengembangan Bioenergi | Penyempurnaan <i>Feed-In-Tariff</i> , Subsidi dan Kelembagaan EBT | Implementasi Teknologi Energi Bersih dan Efisien | Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (<i>Small Grid System</i>) | Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Pembangunan PLT berbasis Hidro | Peningkatan Capacity Building Panas Bumi | Pembangunan Infrastruktur Bioenergi | Penyempurnaan Regulasi <i>Feed-in-Tariff</i> EBT | Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Cerdas | Regulasi dan Mekanisme Penetapan Pembangunan <i>Small Grid System</i> secara Komprehensif | Penyusunan Regulasi Insentif untuk Industri EBT dan Konservasi Energi Dalam Negeri |
| Pengembangan PLT Nuklir/Thorium | Pembangunan Research Center Panas Bumi | Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) | Pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE) | Peningkatan Capacity Building bagi Pemerintah Daerah untuk Efisiensi Energi | Pembangunan Jaringan Tenaga Listrik Skala Kecil | Pembangunan Sarana Pengujian Kualitas Aneka EBT |
| | Peningkatan Kualitas Data Cadangan Panas Bumi | | Pembentukan Badan Usaha EBT | Penghematan Energi dan Air pada Bangunan/Gedung | | Riset Teknologi EBT dan Konservasi Energi Bagi Industri Nasional |
| | Pembangunan PLTP | | | | | |

Rancangan Program Prioritas: Ketahanan Energi (2/2)

PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN ENERGI

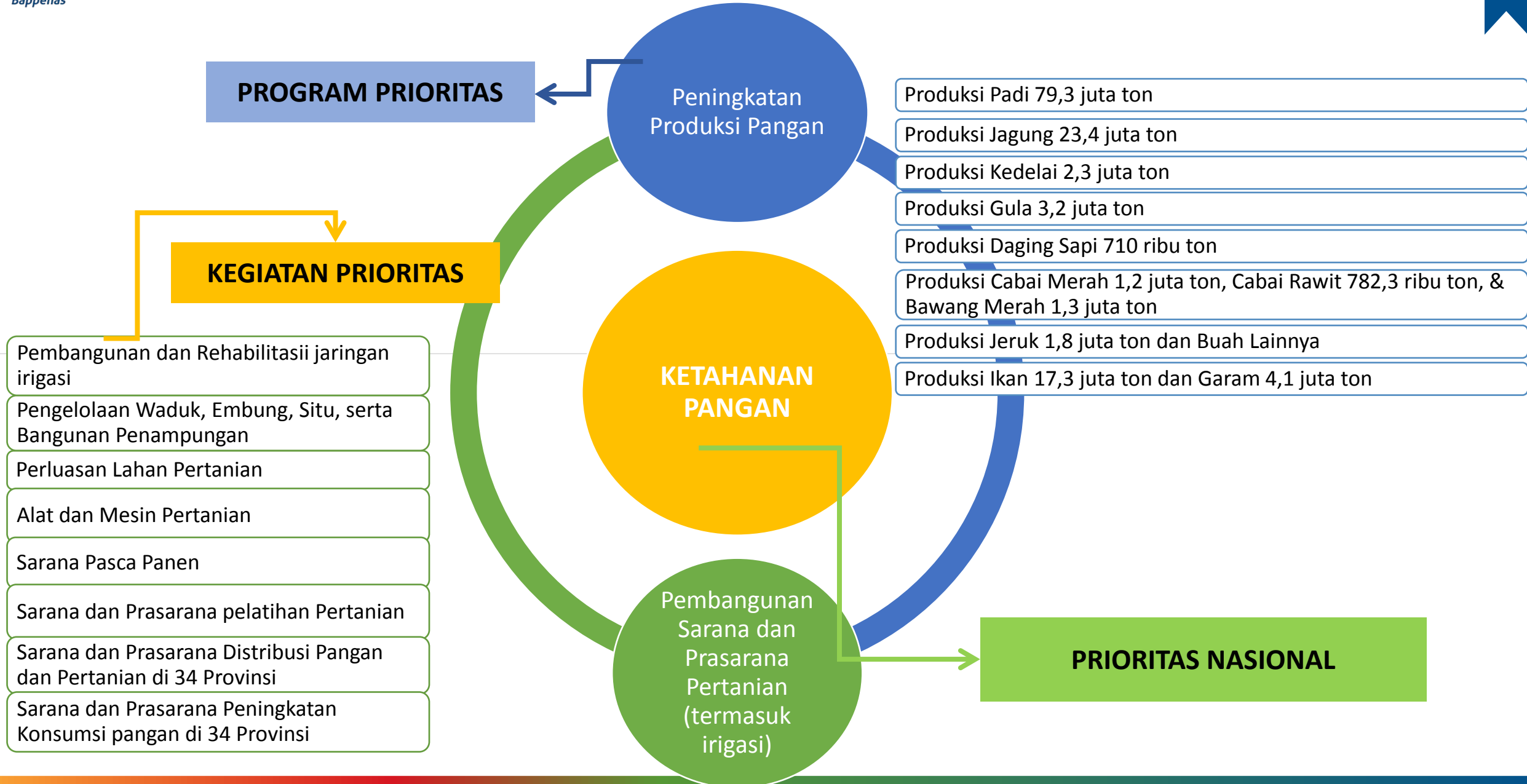
| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi | Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi | Pembentukan Cadangan Penyangga Energi | Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi | Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Pembangunan pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk | Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga | Eksplorasi minyak dan gas bumi | Pembangunan Cadangan Penyangga Energi | Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi | Penyediaan Alokasi Gas Domestik |
| Penetapan harga energi listrik dan penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran | Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM | Survei sumber daya migas konvensional dan non-konvensional | | Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Non Konvensional | Pemantauan dan pengawasan penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri |
| Perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu | Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG | | | Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Konvensional | Tata Kelola dan Penetapan Zonasi Penyediaan Batubara untuk PLTU dan Industri |
| | Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Nelavan | | | Penawaran WK Migas Non Konvensional | |
| | Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan | | | Peningkatan Daya Tarik Investasi Minyak dan Gas Bumi | |
| | Pembangunan LCNG/LNG | | | Penawaran WK Minyak dan Gas Bumi Konvensional | |
| | Fasilitasi Pembangunan FSRU/Regasifikasi On-shore/Liquefied Natural Gas Terminal | | | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untuk Eksplorasi Migas | |
| | Fasilitasi dan monitoring Pembangunan Kilang dan RDMP (Refinery Development Master Plan) | | | Penyempurnaan Regulasi Minyak dan Gas Bumi | |
| | Penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran | | | | |
| | Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi | | | | |
| | Pembangunan ruas pipa transmisi dan jaringan pipa | | | | |



Kementerian PPN/
Bappenas

6. PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN

PN Ketahanan Pangan



PROGRAM PRORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Padi 79,3 juta ton

PROYEK PRIORITAS

Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya padi di 15 provinsi

Bantuan benih pada padi jajar legowo di 15 provinsi

Penyediaan pupuk bersubsidi dan pendampingan padi di 15 provinsi

Asuransi dan bantuan puso padi di 15 provinsi

Penguatan penyuluhan padi di 15 provinsi

Penguatan statistik padi/beras di 15 provinsi

Penyediaan fasilitas dan pelatihan pertanian melalui Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S)

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Jagung 23,4 juta ton

PROYEK PRIORITAS

Pengembangan Sistem perbenihan jagung di 10 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya jagung di 10 provinsi

Bantuan benih pada jagung hibrida di 10 provinsi

Subsidi pupuk untuk jagung di 10 provinsi

Bantuan puso untuk jagung di 10 provinsi

Penguatan penyuluhan jagung di 10 provinsi

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Kedelai 2,3 juta ton*

PROYEK PRIORITAS

Pengembangan Sistem perbenihan kedelai di 10 provinsi

Pengembangan teknologi budidaya kedelai di 10 provinsi

Bantuan benih kedelai di 10 provinsi

Bantuan puso untuk kedelai di 10 provinsi

Subsidi pupuk untuk kedelai di 10 provinsi

Penguatan penyuluhan kedelai di 10 provinsi

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Gula 3,2 juta ton

PROYEK PRIORITAS

Pengembangan benih tebu

Perluasan areal budidaya tebu di DIY, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku Utara, Sulsel, NTB, Sulteng, dan Sultra

Pengembangan dan penelitian teknologi produksi tebu

Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

Ket : * Kedelai merupakan komoditas pangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di dalam RPJMN 2015-2019, tetapi disarankan untuk tidak diprioritaskan dalam alokasi pendanaan dikarenakan faktor iklim.

Rancangan Program Prioritas : Peningkatan Produksi Pangan (2/2)

PROGRAM PRORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

KEGIATAN PRIORITAS

**Produksi Daging Sapi
710 ribu ton**

PROYEK PRIORITAS

Penyediaan pakan ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Produksi Benih Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Penyediaan Bibit Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Penguatan Kelembagaan Pembibitan dan Produksi Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Percepatan peningkatan populasi ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong

Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi hewan di 13 sentra/kawasan sapi potong

Asuransi Sapi di 13 sentra/kawasan sapi potong

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Cabai Merah 1,2 juta ton, Cabai Rawit 782,3 ribu ton, dan Bawang Merah 1,3 juta ton

PROYEK PRIORITAS

Perluasan Kawasan Aneka Cabai di 9 provinsi dan bawang di 4 provinsi

Penyediaan Benih Bawang Merah dan Benih Cabai, diutamakan varietas lokal

Pengendalian OPT Hortikultura

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Jeruk 1,9 juta ton dan Buah lainnya

PROYEK PRIORITAS

Penyediaan benih buah di 8 provinsi

Perluasan Areal Budidaya Jeruk dan buah lainnya di 8 provinsi

Pengembangan teknologi varietas unggul lokal yang komersial

Pengendalian OPT Buah

KEGIATAN PRIORITAS

Produksi Ikan 17,3 juta ton dan garam 4,1 juta ton

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan produksi perikanan tangkap di 11 WPP

Peningkatan produksi perikanan budidaya

Sistem Perkarantina dan Keamanan Hayati Ikan

Industrialisasi perikanan

Peningkatan Produksi garam

Konservasi Pesisir dan Laut (habitat ikan)

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

| KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi | Pengelolaan waduk, embung, situ, serta bangunan penampung air lainnya | Perluasan lahan pertanian | Alat dan mesin pertanian |
| PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi permukaan: berat-sedang-ringan | Pembangunan bendungan | Verifikasi luas sawah baku | Mengkaji kebutuhan dan skema pendanaan kredit untuk pengadaan Alsintan |
| Rehabilitasi bendung irigasi : berat-sedang-ringan | Pembangunan embung dan bangunan penampung lainnya. | Penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan RTDR yang memasukkan LP2B | Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen padi |
| Pembangunan Jaringan Irigasi permukaan | | Optimasi lahan | Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen jagung |
| Pembangunan bendung irigasi | | Cetak sawah | Penyaluran dan pemanfaatan bantuan Alsintan Budidaya Tebu di Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sulsel, Sumsel |
| Pembangunan konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif. | | | |

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

KEGIATAN PRIORITAS

Sarana pasca panen

PROYEK PRIORITAS

Revitalisasi penggilingan padi

Penyaluran alat pascapanen perkebunan

Pembangunan dan Fasilitas Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)

Pembangunan Bangsal Pascapanen dan teknik pengemasan

Pembangunan Cold Storage Hortikultura dan perikanan

Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan

KEGIATAN PRIORITAS

Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi

PROYEK PRIORITAS

Resi gudang

Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan

Fasilitas sarana dan prasarana kelembagaan pasar ternak

Revitalisasi pasar

Penguatan karantina pangan dan pertanian

KEGIATAN PRIORITAS

Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi

PROYEK PRIORITAS

Peningkatan keamanan dan mutu pangan

Penguatan kualitas konsumsi pangan

Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan



Kementerian PPN/
Bappenas

7. PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Prioritas Nasional 7: Penanggulangan Kemiskinan



PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN

| KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah | Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial | Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan | Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat | Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran |
| PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS |

Penyaluran bantuan sosial melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bantuan pendidikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK melalui KIP | Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional | Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai di 98 kota dan 188 kabupaten | Penyaluran Bantuan PKH Secara Non Tunai | Subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA |
| Beasiswa Mahasiswa Miskin/Bidik Misi | Monitoring dan evaluasi terpadu JKN dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Rastra) | Penyaluran Bantuan PKH Secara Reguler | Subsidi elpiji 3 kg |
| | Percepatan peningkatan kepesertaan jaminan sosial melalui advokasi, sosialisasi, dan inovasi pendaftaran dan pembayaran iuran | | Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) | |

PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

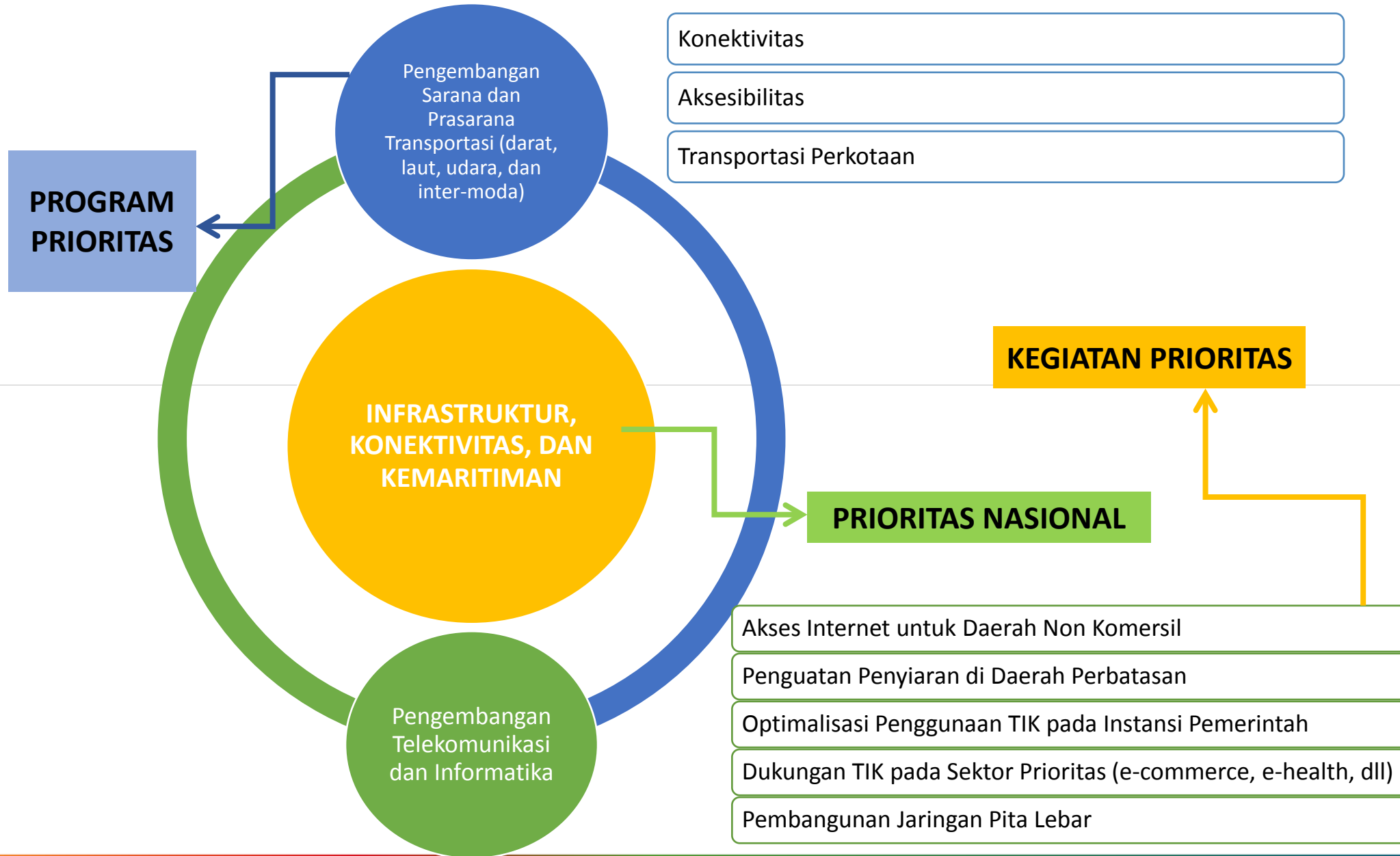
| KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan | Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar | Peningkatan Inklusivitas Pelayanan dasar | Penyediaan Layanan Dasar |
| PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS |
| Percepatan kepemilikan akta kelahiran melalui advokasi, sosialisasi dan pelayanan terpadu | Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu | Pendidikan anak berkebutuhan khusus | Penyediaan Infrastruktur Dasar Air Minum, Sanitasi, jalan, dan infrastruktur dasar lainnya |
| Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik | Penerapan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan dan sosial, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman | Advokasi dan edukasi perlindungan anak berkebutuhan khusus | Penyediaan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah |
| | Pemantapan bagi organisasi dan pekerja sosial | Penyediaan Literasi Khusus bagi penyandang disabilitas | Bantuan Subsidi Bunga Kredit Perumahan |
| | Pelaksanaan Belanja APBD untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan | Pemberian Pelayanan <i>Home Care</i> bagi Lanjut Usia | Bantuan Pembiayaan KPR Swadaya, Sejahtera Tapak, Sarusun |
| | | | Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil |

PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL DAN KOPERASI

| KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS | KEGIATAN PRIORITAS |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha | Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran | Pengembangan Kewirausahaan | Perluasan Akses Pembiayaan | Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha |
| PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS | PROYEK PRIORITAS |
| Pelatihan SDM KUMKM Berbasis Kompetensi | Penguatan Sistem Bisnis bagi Koperasi/Sentra Usaha Mikro | Pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan | Penguatan Modal KUMKM | Fasilitasi Akta Koperasi | Perbaikan Tata Kelola dan Kelembagaan Koperasi |
| Pelatihan, Pendampingan, dan Pemagangan | Perluasan Akses Pemasaran | Pengembangan Inkubator Bisnis | Peningkatan Akses UMKM untuk Mendapat Kredit | Registrasi Usaha Skala Mikro dan Kecil | Fasilitasi Kelembagaan Usaha Koperasi bagi BUM Desa dan Kelompok Usaha Masyarakat |
| Pengembangan Layanan Usaha | Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha bagi UMKM | | Penyediaan Modal Awal Usaha | | Pengembangan dan Pengawasan Kemitraan Usaha |
| | Fasilitasi Sertifikasi, Standardisasi, Merek, dan Pengemasan | | | | Peningkatan Kapasitas Koperasi |



8. PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN



Program Prioritas:

Pengembangan Sarana & Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara & Inter-moda)

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konektivitas | Aksesibilitas | Transportasi Perkotaan |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan | Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan |
| Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Kawasan Perbatasan | Pembangunan Fly Over/Under Pass Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan |
| Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Daerah Tertinggal | Penyediaan Armada BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan |
| Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Daerah Tertinggal | Pengembangan Kota dengan Sistem BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan |
| Pembangunan/Pembaharuan Kapal Niaga Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Penyediaan Armada Perintis Mendukung Daerah Tertinggal | Pengembangan Kota dengan Sistem Angkutan Umum Berbasis Rel Mendukung Angkutan Umum Perkotaan |
| Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Bandara/Pelabuhan/Terminal Mendukung Integrasi Antar Moda | Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Perintis Mendukung Daerah Tertinggal | |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik | | |
| Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Jalur Utama Logistik | | |
| Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik | | |
| Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Mendukung Jalur Utama Logistik | | |

Program Prioritas:

Pengembangan Telekomunikasi Dan Informatika

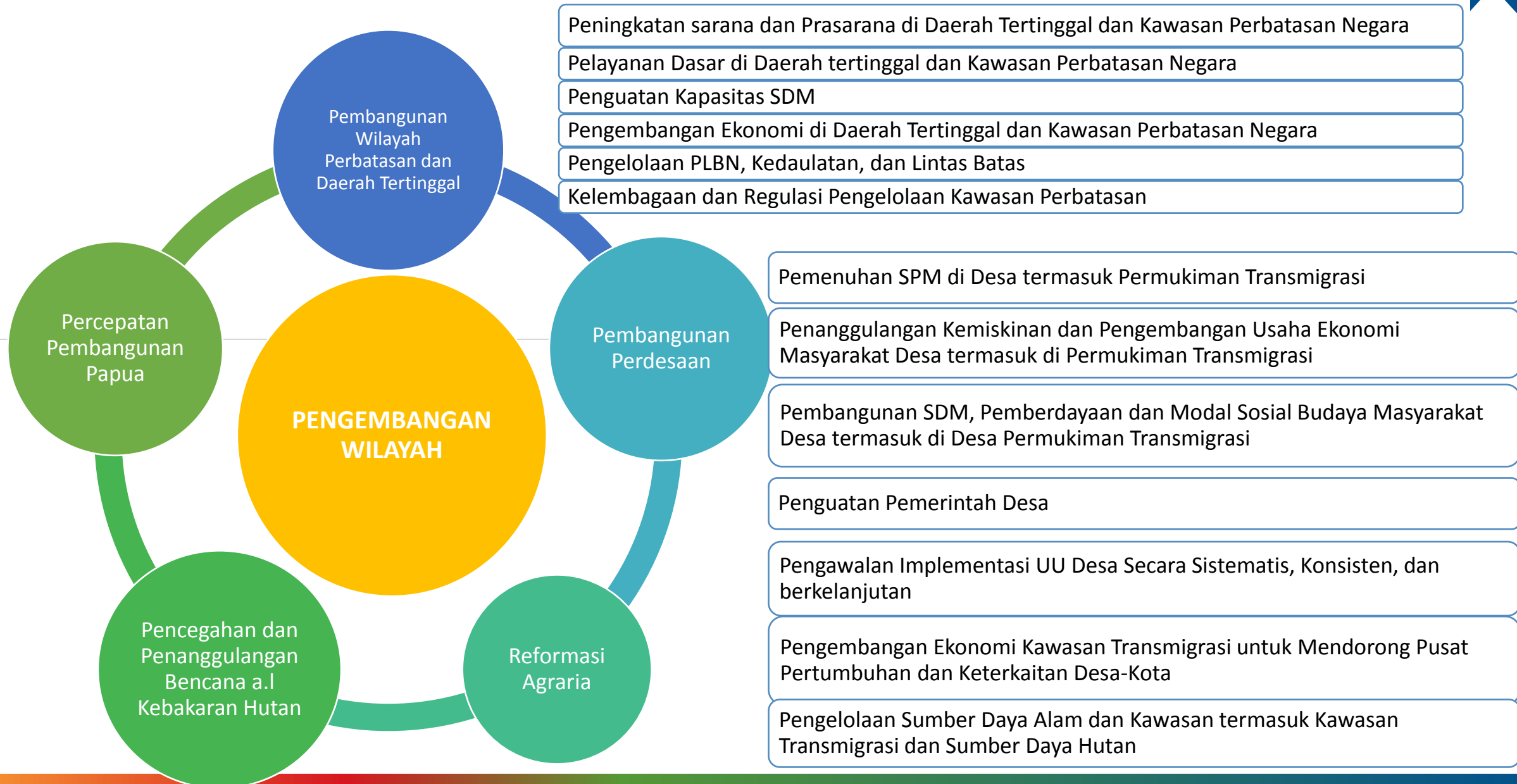
| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Akses Internet Untuk Daerah Non Komersil | Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan | Optimalisasi Penggunaan TIK Pada Instansi Pemerintah | Dukungan TIK Pada Sektor Prioritas (E-commerce, E-health, DII) | Pembangunan Jaringan Pita Lebar |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Pembangunan BTS Di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi | Pembangunan Pemancar LPP RRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar | Implementasi Masterplan, Arsitektur E-government Nasional, Dan Piloting Datacenter Nasional | Layanan Pemberian Domain .Id Gratis | Palapa Ring (Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional) |
| Jasa Akses Internet Broadband Di Wilayah Layanan Telekomunikasi | Pembangunan Pemancar LPP TVRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil Dan Pulau Terluar | Pemantauan Jaringan Internet Pada ISP/NAP/IX/ Titik Strategis Lainnya Melalui Sistem Deteksi Dini | Fasilitasi Technopreneur Untuk Memperoleh Seed Funding | Penataan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Mendukung Mobile Broadband |
| Desa Broadband Terpadu | Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Radio Publik | | Dukungan TIK Dalam Layanan Kesehatan | |
| | Pembangunan Pemancar Transmisi Dan Distribusi Penyiaran Televisi Publik | | Jaringan Pendidikan Nasional Dan E-education | |
| | Penyediaan Siaran Di Daerah Perbatasan | | | |
| | Pelaksanaan Siaran Digital Televisi Publik | | | |



Kementerian PPN/
Bappenas

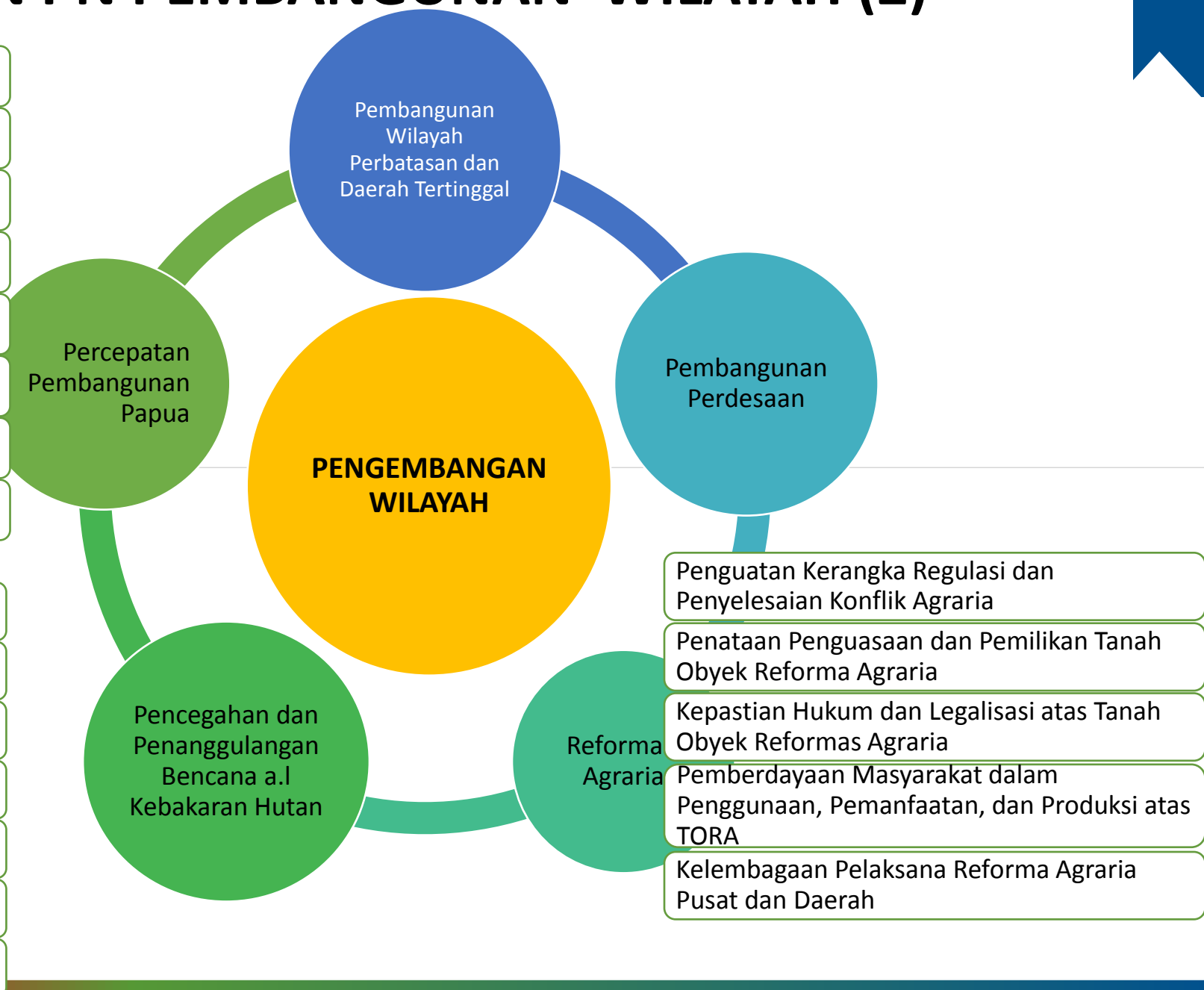
9. PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH

PN Pembangunan Wilayah (1)





ARAH KEBIJAKAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH (2)



- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
- Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar
- Pengembangan konektivitas wilayah
- Pengelolaan sumber daya alam unggulan, pengembangan industri lokal & strategis dan pariwisata
- Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan
- Penataan kelembagaan & regulasi, dan tanah ulayat
- Pemberdayaan Masyarakat
- Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
- Sarana dan Prasarana Kebencanaan
- Pelayanan Dasar
- Pengembangan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana
- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana
- Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

Rancangan Program Prioritas

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN



| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi | Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi | Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi | Penguatan Pemerintahan Desa | Pengawasan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan | Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota | Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih) | Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa | Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa | Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa | Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa | Penataan Kawasan Sentra Nelayan | Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan |
| Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan | Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan terutama UMKM | Pendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan | Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa | Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa | Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata | Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim |
| Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi | Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna | Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan | Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa | | Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah | Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna |
| Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah | | Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal | Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa | | Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama | Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan |
| Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi | Penguatan Permodalan dan Akses Pasar | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas | Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa | | Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran | Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan |
| | | Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa | | | Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing | Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan |

Rancangan Program Prioritas: Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

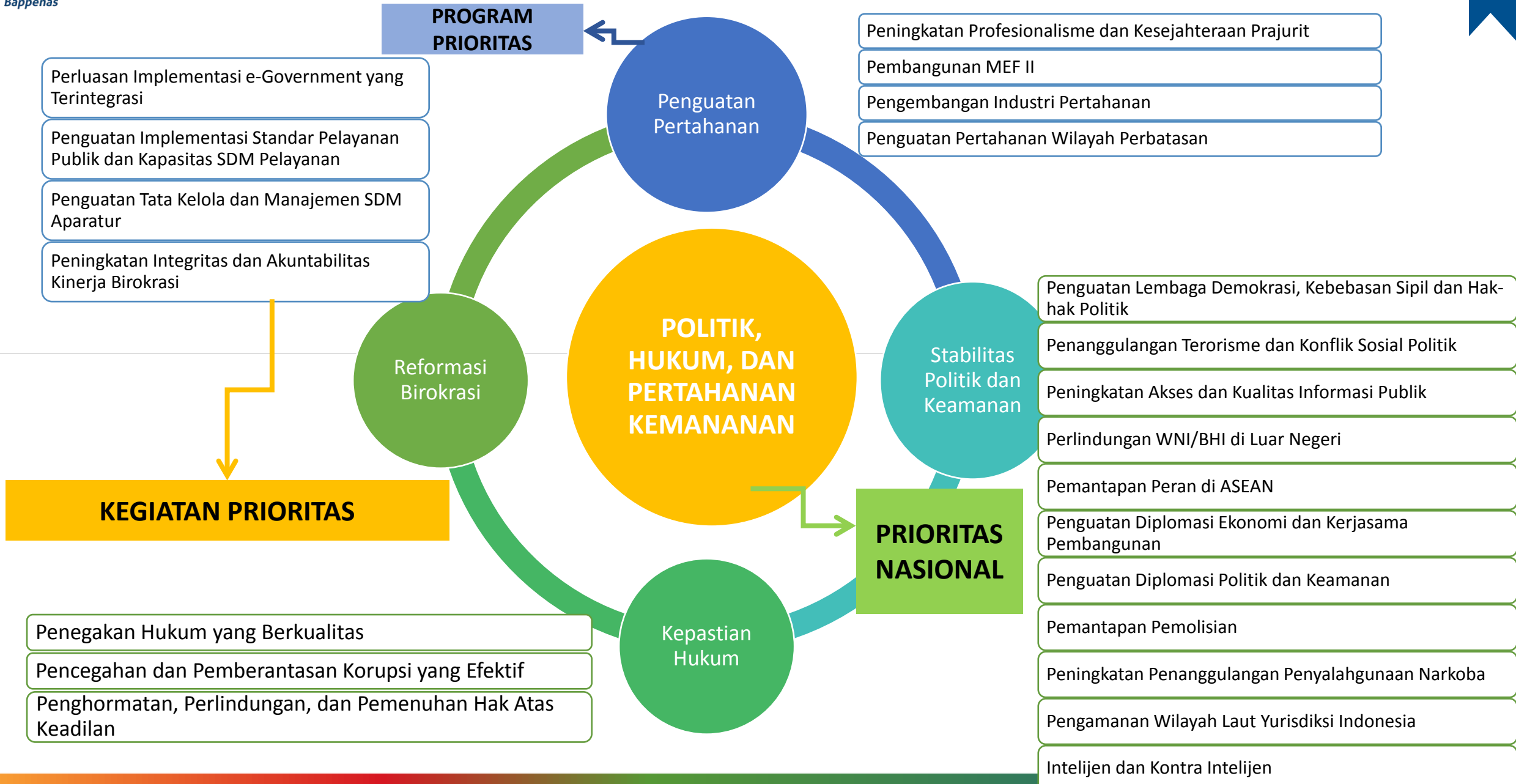
| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberdayaan Masyarakat | Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana | Sarana dan Prasarana Kebencanaan | Pelayanan Dasar Kebencanaan | Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana | Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan | Penguatan Kelembagaan dan Regulasi |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi | Sosialisasi dan Simulasi Bencana Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana | Penyediaan Sistem Peringatan dini Pembangunan pusat logistik kebencanaan Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana Pengembangan teknologi kebencanaan | Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana Penyediaan layanan data dan informasi bencana | Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana | Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan Rehabilitasi pesisir Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlan Rehabilitasi DAS | Penyusunan kajian dan peta risiko Penguatan koordinasi penanggulangan bencana Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana |

PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria | Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria | Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA | Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah |
| Proyek Prioritas Nasional | Proyek Prioritas Nasional | Proyek Prioritas Nasional | Proyek Prioritas Nasional | Proyek Prioritas Nasional |
| Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria Penyelesaian Konflik Agraria | Inventarisasi P4T dan Identifikasi tanah obyek reforma agraria | Perbaikan proporsi petugas ukur dan pemetaan serta petugas Reforma Agraria di Kab/Kota | Koordinasi lokasi dan target pemberdayaan serta perencanaan tata guna pada TORA | Penyediaan Pedoman teknis dalam kerangka RA |
| Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis | Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria | Peningkatan cakupan peta dasar pertanahan | Penyediaan bantuan permodalan dan pengembangan kelembagaan petani untuk akses modal usaha | Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat |
| Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis | Identifikasi dan Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Tanah Terlantar dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Lainnya | Peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat melalui legalisasi aset (PRONA, sertipikasi lintas sektor) terutama bagi rakyat miskin | Penyediaan bantuan pendampingan dan pembangunan infrastruktur untuk perbaikan ekosistem dan produksi pada TORA | Pembentukan dan operasionalisasi gugus tugas pelaksanaan RA di Tk. Daerah |
| Melakukan Review terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat | | Publikasi tata batas kawasan hutan | | Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum |
| Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-kasus Konflik Agraria | Identifikasi dan Legalisasi Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin di Perkotaan dan Pedesaan | Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi | | Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah untuk Kepentingan umum |
| Mediasi dan ADR Lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis | Penyelesaian Pelepasan Kasawan Hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria termasuk Tata Batas | Legalisasi untuk tanah transmigrasi | | |
| | | Sosialisasi peraturan terkait adat/ulayat dan legalisasi pengakuan wilayah adat | | |



10. PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN



Rancangan Program Prioritas: Penguatan Pertahanan

PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Peningkatan Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit | Pembangunan MEF II | Pengembangan Industri Pertahanan | Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Pembangunan dan Rehabilitasi Perumahan Prajurit | Interoperability Pertahanan Integratif Trimatra | Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan | Pemantapan Pertahanan di Wilayah Natuna dan Perbatasan |
| Pemantapan latihan dan kesiapsiagaan operasi militer selain perang | Pertahanan Teritorial Strategis | | |
| | Pertahanan Laut dan Dukungan Poros Maritim | | |
| | Pertahanan Ruang Udara Nasional | | |

PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (1)

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik | Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik | Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik | Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri | Pemantapan Peran di ASEAN |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Pendidikan Pemilih | Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Peningkatan Kualitas Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri | Peningkatan Peran Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia |
| Pemutakhiran Data Pemilih | Penguatan dan Pemberdayaan Forum-Forum Dialog Kewaspadanaan Nasional | Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyiaran dan Pers | | Regulasi Fasilitas Pajak dan Bea Cukai Sektor Jasa Indonesia dalam MEA |
| Pengawasan Pemilu Partisipatif | | | | |
| Bantuan Keuangan Partai Politik | Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme | Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo | | |

PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN (2)

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan | Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan | Pemantapan Pemolisian | Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba | Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia | Intelijen dan Kontra Intelijen |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| Peningkatan Peran Swasta dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular | Penguatan Perundingan Perbatasan | Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan Ketertiban | Pemberantasan Narkoba | Peningkatan Operasi Kamla di Wilayah Rawan | Deteksi Dini Keamanan Nasional |
| Penguatan Pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Amerika Latin | Implementasi <i>Document of Conduct</i> dan kemajuan substantif perumusan <i>Code of Conduct</i> | Penanganan Kejahatan dan Gangguan Ketertiban | Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba | | Pengamanan Data dan Informasi Negara |
| Pembentukan <i>Single Agency</i> KSST | Pencapaian Visi 4000 <i>Peacekeepers</i> | Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat | | | |
| Penguatan Diplomasi Maritim (Ekonomi) | Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tetap DK-PBB | | | | |
| Penguatan Diplomasi Ekonomi di Pasar Prospektif | Penguatan Diplomasi Maritim (Politik - Keamanan) | | | | |

PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM

Kegiatan Prioritas

Penegakan Hukum yang Berkualitas

Proyek Prioritas

Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Penuntutan

Pengurangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Masyarakat

Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara (SPPT-TI)

Pelayanan Hukum yang mendukung Kemudahan Berusaha

Peningkatan kapasitas SDM Apgakum dan Pemahaman Masyarakat tentang SPPA

Evaluasi dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Prioritas

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif

Proyek Prioritas

Kolaborasi Pencegahan Korupsi

Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di tingkat Pusat

Kegiatan Prioritas

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan

Proyek Prioritas

Penguatan SPPT-PKKTP dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Peningkatan Kerjasama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Paralegal di Kab/Kota dalam Penyaluran Bantuan Hukum

Rancangan Program Prioritas: Reformasi Birokrasi

PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

| Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas | Kegiatan Prioritas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Perluasan Implementasi <i>e-Government</i> yang terintegrasi</p> | <p>Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan</p> | <p>Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur</p> | <p>Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</p> |
| Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas | Proyek Prioritas |
| <p>Penerapan <i>e-Government</i> pada instansi pemerintah pada 705 K/L/D (antara lain: <i>e-Office, e-Performance, e-Budgeting, e-Management-Kepegawaian, Complain Handling Mechanism (LAPOR)</i>)</p> <p>Penerapan <i>e-Services</i> pada 50% dari unit pelayanan publik yang ada</p> <p>Desain perbaikan infrastruktur dan penerapan <i>e-Arsip</i> di 163 K/L</p> <p>Pengintegrasian <i>e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting</i> antara Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenpan-RB</p> <p>Penguatan Sistem <i>Monev-Next Generation</i> online PBJ seluruh K/L/D yang terintegrasi dengan RENJA dan RKA K/L</p> | <p>Pelatihan Aparatur Pelayanan Publik di masing-masing unit pelayanan publik</p> <p>Penerapan SPM pada seluruh unit pelayanan publik (100%)</p> <p>Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat</p> <p>Rekomendasi perbaikan kebijakan pelayanan publik</p> | <p>Restrukturisasi kelembagaan STIA-LAN menjadi <i>National Institute for State Aparatus</i></p> <p>Penyusunan <i>Human Capital Development Plan</i>-Pemenuhan kebutuhan Diklat minimal 40 jam untuk mendukung kompetensi inti ASN</p> <p><i>Grand Design Public Administration</i></p> <p>Penataan kelembagaan LPNK</p> <p>Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian / ASN</p> <p>Pengembangan <i>talent pool</i> ASN nasional</p> <p>Penerapan regulasi teknis manajemen ASN di seluruh K/L/D</p> <p>Pelaksanaan diklat RLA</p> <p>Pengawasan pelanggaran netralitas dan sistem merit ASN</p> <p>Penguatan Inovasi dalam rangka Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah</p> | <p>Penerapan Sistem Integritas Aparatur Negara di seluruh K/L (100%)</p> <p>Beasiswa dan diklat untuk 10.000 orang di Bidang Pengawasan/Auditor</p> <p>Penguatan kapasitas dan pemenuhan 17 standarisasi pada 610 LPSE</p> <p>Kebijakan untuk perbaikan seluruh kinerja K/L</p> <p>Peningkatan Efektifitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa</p> |

Terima Kasih